



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA**



2018 LAPORAN TAHUNAN

Kata **PENGANTAR**

Laporan Tahunan ini merupakan rekaman proses pelaksanaan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang telah diprogramkan sejak awal Januari sampai akhir Desember 2018. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, capaian hingga evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun kegiatan rutinitas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berupaya mengoptimalkan kemampuannya untuk melakukan hal yang terbaik. Mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola organisasi, penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan kerjasama dengan stakeholder lainnya. Walaupun dalam realisasinya mengalami rintangan dan hambatan, akan tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya kerjasama yang baik dan kompak dari seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Kami berharap bahwa penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018 dapat berguna bagi proses evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika serta pihak-pihak terkait dalam membina hubungan kerjasama.

Ranai, Februari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA



RAJA DARMIKA, ST. MAP
NIP. 19741216 200003 1 003

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	lii
DAFTAR GAMBAR	lv
BAB I PENDAHULUAN	
Sejarah berdirinya Perangkat Daerah	2
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Tugas Pokok dan Fungsi	4
B. Struktur Organisasi	21
C. Sumber Daya Manusia	23
D. Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Rutinitas Kantor	26
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	
A. Visi Misi RPJMD 2016-2021	29
B. Program Pemerintah Daerah Pendukung Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021	31
C. Program Perangkat Daerah tertuang dalam RPJMD 2016-2021	32
D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas (Renstra 2016-2021)	32
BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	
A. Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2018	40
B. Program/Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2019	74
C. Hasil Capaian Program RPJD 2016-2021 Tahun 2017 & 2018	76
D. Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2017 & 2018	76
E. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	76
BAB V HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS SKPD	82
BAB VI PENUTUP	104
LAMPIRAN	

Daftar TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1.	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan	23
Tabel 2.2.	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 2.3.	Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	24
Tabel 2.4.	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.5.	Data Diklat Struktural Kepemimpinan	26
Tabel 2.6.	Hasil Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	27
Tabel 3.1.	Program Prioritas mendukung Visi Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021	33
Tabel 3.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021	34
Tabel 3.3.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika	35
Tabel 4.1.	Daftar CPanel, Website dan e-Mail	61
Tabel 4.2.	Hasil Capaian Program RPJMD 2016-2021 melalui pelaksana RKPD Tahun 2017 & 2018	79
Tabel 4.3.	Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 & 2018	80
Tabel 5.1.	Surat Masuk/Surat Keluar Tahun 2018	83
Tabel 5.2.	SK Masuk/SK Keluar	83
Tabel 5.3.	Daftar PNS yang mengikuti diklat/kursus Tahun 2018	85
Tabel 5.4.	Daftar Pegawai Negeri Sipil yang Naik Pangkat Golongan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	86
Tabel 5.5.	Layanan Telekomunikasi Reguler	97
Tabel 5.6.	Data Sanapati	99
Tabel 5.7.	Bantuan Program Tower BTS	99
Tabel 5.8.	Akses Internet	101
Tabel 5.9.	Jumlah Kunjungan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	103
Tabel 5.10.	Jumlah Kunjungan Website Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2018	104

Daftar **GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	22
Gambar 2.2. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan	23
Gambar 2.3. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin	26

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

SEJARAH BERDIRINYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan Dinas Type C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna tertuang dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

Urusan komunikasi dan Informatika merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tertera dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. Sekalipun secara nomenklatur, pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 ini merupakan dinas baru, namun demikian secara operasional sebenarnya urusan pemerintahan yang terkait dengan komunikasi dan informatika sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dengan nama dan level kelembagaan yang berbeda.

Sebelum tahun 2017, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika terutama yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ditangani oleh salah satu bidang di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan urusan persandian ditangani oleh sub bagian pada bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, sedangkan urusan statistik daerah ditangani oleh salah satu bidang di Bappeda.

GAMBARAN UMUM

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi setiap jabatan adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.

➔ *Uraian Tugas*

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan kewenangan lingkup tugasnya;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan e-Government;
- 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika;
- 4) Menetapkan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- 5) Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika;
- 6) Menetapkan operasional administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkungan dinas;
- 7) Menetapkan operasional di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan di bidang penyelenggaraan e-Government;
- 8) Menetapkan rekomendasi/perizinan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- 9) Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas dengan memfasilitasi peningkatan kinerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- 10) Pengendalian dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan e-government dan tugas lainnya di lingkungan dinas;
- 11) Menilai hasil kerja pegawai di lingkungan dinas;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan secara berkala sebagai akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika.

⇒ ***Fungsi***

- 1) Merumuskan dan/atau menetapkan regulasi dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan program di lingkungan dinas;
- 3) Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, dan urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;
- 4) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika dan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;
- 5) Mengevaluasi penyelenggaraan kinerja pelayanan di bidang komunikasi dan informatika serta tugas lainnya di lingkungan dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.

⇒ ***Uraian Tugas***

- 1) Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan Dinas;
- 2) Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sekretariat;

- 3) Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
- 4) Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
- 5) Menyusun pelaporan dinas;
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- 7) Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- 8) Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja dinas;
- 9) Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
- 10) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

⇒ ***Fungsi***

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;
- 2) Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- 4) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menjalankan tugas pokok; Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoreksi pelaksanaan urusan administrasi perkantoran, tata laksana organisasi, kelengkapan rumah tangga, urusan kepegawaian, arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat berpedoman

kepada Kebijakan Umum dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

⇒ ***Uraian Tugas :***

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;
- 3) Meyiapkan pembinaan dan pelatihan SDM pegawai di lingkup Dinas;
- 4) Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Menyiapkan Laporan Tahunan Dinas;
- 6) Menyiapkan Profil Dinas;
- 7) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 8) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 9) Melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan urusan umum Dinas;
- 10) Melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan laporan tahunan dan profil dinas;
- 11) Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 12) Membina pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menjalankan tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan tata kelola keuangan dinas.

⇒ ***Uraian Tugas***

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Menyiapkan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Dinas;
- 3) Menyiapkan rekapitulasi LRFK Dinas;
- 4) Menyiapkan LAKIP Dinas;

- 5) Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 6) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 7) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 8) Melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data LPPD, LKPJ, LAKIP di lingkup Dinas;
- 9) Menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang persediaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyiapkan laporan keuangan Dinas;
- 11) Menyiapkan laporan aset dan barang persediaan Dinas;
- 12) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 13) Melaksanakan operasional penggunaan aset dan barang persediaan Dinas;
- 14) Melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan dilingkup Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 15) Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 16) Membina pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok: Merencanakan, menyusun dan mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

➤ Uraian tugas:

- 1) Merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Merencanakan operasional kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 3) Menyusun regulasi, kebijakan teknis dan operasional operasional penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;

- 4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkup Dinas dan lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- 5) Menyusun operasional penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;
- 6) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;
- 7) Menyusun rekomendasi dan/atau perizinan atas penyelenggaraan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 8) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 9) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 10) Menilai hasil kerja pegawai di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 11) Menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik kepada atasan;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

⇒ ***Fungsi***

- 1) Merencanakan perumusan regulasi dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 2) Menyusun operasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;
- 3) Menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoreksi pelaksanaan urusan menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

⇒ ***Uraian tugas:***

- 1) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja lima tahun dan tahunan di Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas penyelenggaraan pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- 6) Melaksanakan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- 7) Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- 8) Melaksanakan pengolahan aduan masyarakat;
- 9) Melaksanakan standarisasi pertukaran untuk data base informasi lintas sektoral;
- 10) Melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- 11) Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan kabupaten;
- 12) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
- 13) Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja, regulasi, kebijakan, operasional, kajian, rekomendasi, perizinan dan kinerja di lingkup Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
- 14) Menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

3.2. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan urusan

penyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.

➔ ***Uraian tugas:***

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan pengelolaan saluran komunikasi publik;
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 6) Melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- 7) Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- 8) Melaksanakan pembuatan konten lokal;
- 9) Melaksanakan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- 10) Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- 11) Melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- 12) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;

- 13) Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja, regulasi, kebijakan, operasional, kajian, rekomendasi, perizinan dan kinerja di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
- 14) Menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

3.3. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik

Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoreksi pelaksanaan urusan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di daerah.

➤ Uraian tugas:

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di daerah;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di daerah;
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan pengembangan kemitraan dan layanan informasi publik;
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di daerah;
- 6) Melaksanakan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Melaksanakan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 8) Melaksanakan layanan pengaduan masyarakat;
- 9) Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
- 10) Melaksanakan Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
- 11) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 12) Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja, regulasi, kebijakan, operasional, kajian, rekomendasi, perizinan dan kinerja di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
- 13) Menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
- 14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

4. Bidang Penyelenggaraan e-Government

Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas pokok: Merencanakan, menyusun dan mengevaluasi penyelenggaraan e-Government.

➔ ***Uraian tugas:***

- 1) Merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- 2) Merencanakan operasional kerja sama lintas OPD lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah di bidang penyelenggaraan e-Government;
- 3) Menyusun regulasi, kebijakan teknis dan operasional layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat,

nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;

- 4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional bidang penyelenggaraan e-Government di lingkup dinas dan lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- 5) Menyusun operasional penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- 6) Menyusun noorma, standar, prosedur dan kreteria atas penyelenggaraan bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- 7) Menyusun rekomendasi dan/ atau perizinan atas penyelenggaraan e-Government;
- 8) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan e-Government;
- 9) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- 10) Menilai hasil kerja pegawai di Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- 11) Menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penyelenggaraan e-Government;

12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

⇒ **Fungsi**

- 1) Merencanakan perumusan regulasi dan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan e-Government;
- 2) Menyusun pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- 4) Menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya

TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;

- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian

Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoreksi pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian.

➔ ***Uraian tugas:***

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian;
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan layanan infrastruktur, telekomunikasi dan persandian;
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian;

- 6) Melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- 7) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- 8) Melaksanakan Government Cloud Computing;
- 9) Melaksanakan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- 10) Melaksanakan filtering konten negatif;
- 11) Melaksanakan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- 12) Melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- 13) Melaksanakan monitoring trafik elektronik;
- 14) Melaksanakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- 15) Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/ radiogram baik yang diterima ataupun dikirim dari Pusat atau daerah;
- 16) Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
- 17) Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem alat-alat Sandi;
- 18) Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
- 19) Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi;
- 20) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan layanan infrastruktur, telekomunikasi dan persandian;
- 21) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- 22) Menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- 23) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- 24) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

4.2. Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penghimpunan data, manajemen data dan informasi e-Government.

➔ ***Uraian tugas:***

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Statistik;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan penelitian, penghimpunan data, manajemen data dan informasi e-Government;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas penyelenggaraan statistik;
- 4) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan penelitian, penghimpunan data, manajemen data dan informasi e-Government;
- 5) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Data;
- 6) Melaksanakan Walidata dan kebijakan;
- 7) Melaksanakan recovery data dan informasi;
- 8) Melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- 9) Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi;
- 10) Melaksanakan interoperabilitas, interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
- 11) Melaksanakan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
- 12) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 13) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Seksi Statistik;
- 14) Menilai kinerja bawahan di Seksi Statisik;

- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Statistik;
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

4.3. Seksi Layanan e-Government

Seksi Layanan e-Government mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoreksi pelaksanaan Government Chief Information Officer (CCIO) pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah.

➤ ***Uraian Tugas:***

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di Seksi Layanan e-Government;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan Government Chief Information Officer (CCIO) pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Government Chief Information Officer (CCIO) pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah;
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan di Seksi Layanan e-Government;
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan Government Chief Information Officer (CCIO) pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah;
- 6) Melaksanakan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten;
- 7) Melaksanakan implementasi e-Government dan Smart City dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- 8) Melaksanakan Promosi pemanfaatan layanan Smart City;
- 9) Melaksanakan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan;

- 10) Melaksanakan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan mengelola domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
- 11) Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
- 12) Melaksanakan dan merubah nama Pejabat Domain, nama domain dan sub domain;
- 13) Melaksanakan tata kelola nama domain, sub domain;
- 14) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan layanan di Seksi Layanan e-Government;
- 15) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Seksi Layanan e-Government;
- 16) Menilai kinerja bawahan di Seksi Layanan e-Government;
- 17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Layanan e-Government;
- 18) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

e. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoreksi pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan jabatan fungsional yang diberikan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

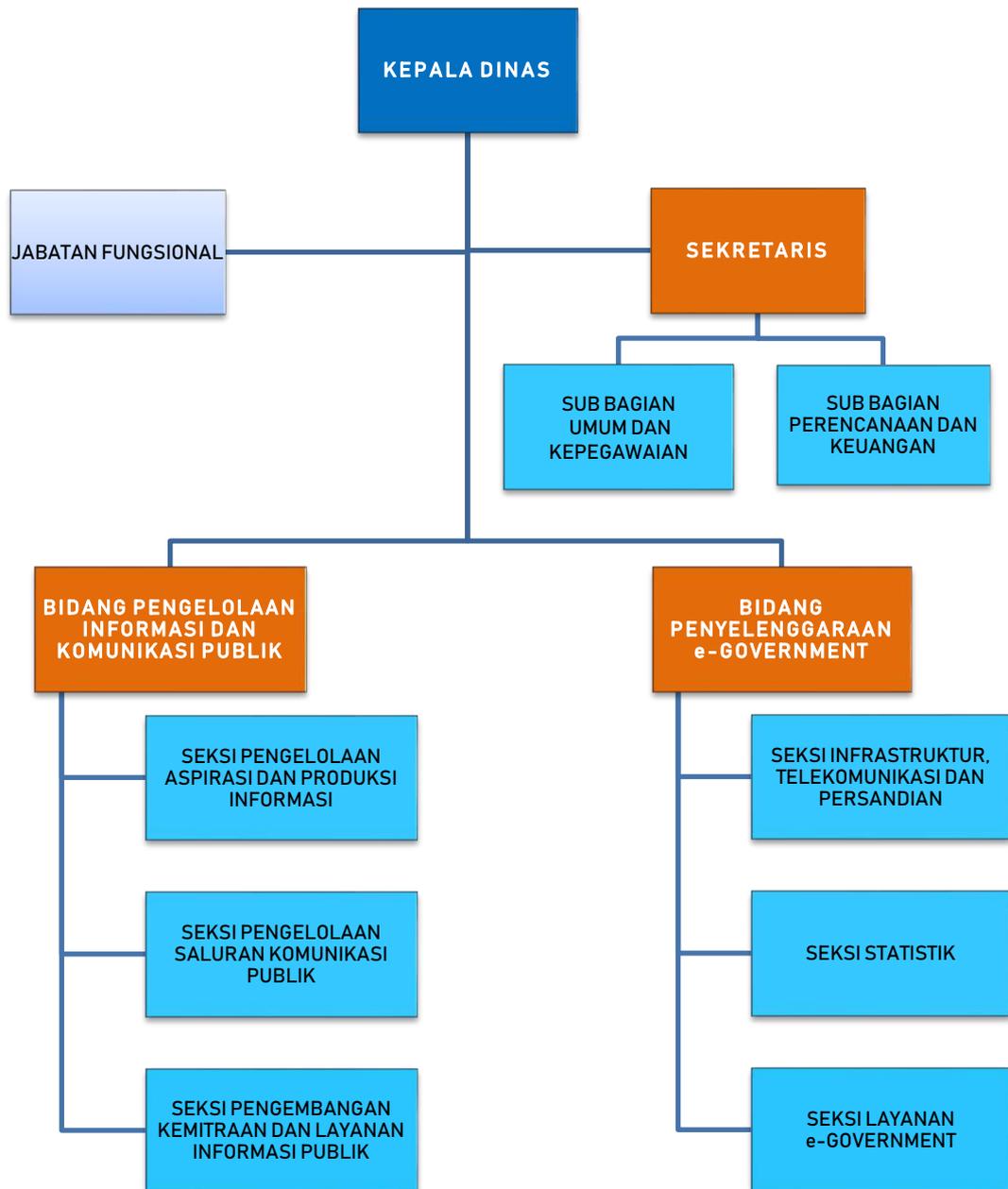
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
 2. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
 3. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik.
4. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi:
 1. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;

2. Seksi Statistik;
3. Seksi Layanan e-Government.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA**



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memiliki pegawai sebanyak 47 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 47 orang tersebut, terdiri dari: Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 2 orang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IV a) sebanyak 8 orang, pelaksana/staf sebanyak 35 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 12 orang, PTT sebanyak 15 orang, Tenaga Teknis 6 orang dan non teknis 2 orang.

Tabel 2.1.
KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	2	-	-	2
4	Kepala Sub Bagian/Seksi	-	-	8	-	8
5	Staf	-	-	-	35	35
JUMLAH		1	3	8	35	47

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

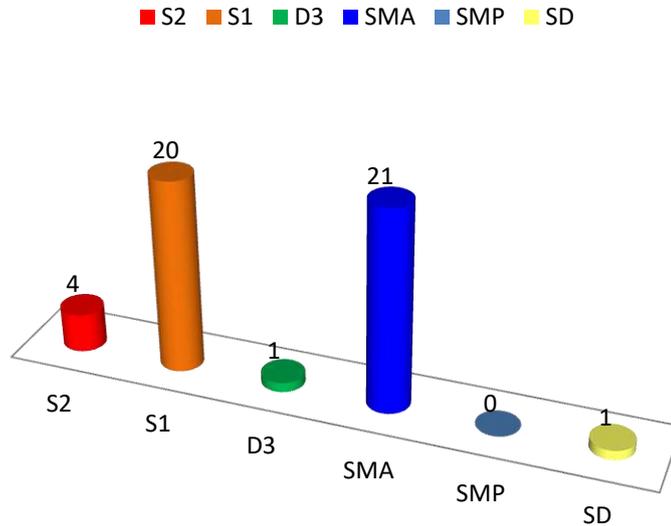
Tabel 2.2.
KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

No.	Uraian	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	1	1	-	-	-	-	2
4	Kepala Sub Bagian/Seksi	-	8	-	-	-	-	8
5	Staf	2	10	1	21	-	1	35
JUMLAH		4	20	1	21	-	1	47
%		8,51	42,56	2,13	44,67	-	2,13	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

Gambar 2.2.

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan



Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, sebanyak 4 orang (8,51%) memiliki pendidikan S2, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 20 orang (42,56%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 1 orang (2,13%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 21 orang (44,67%), yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang (2,13%).

Tabel 2.3.
KONDISI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN
GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Bidang Penyelenggaraan e-Government		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	1	-	1	-	2	-	2
II/c	3	1	-	-	1	-	4	1	5

II/d	-	1	-	-	-	-	-	1	1
III/a	1	-	-	-	-	-	1	-	1
III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/c	-	1	1	-	3	1	4	2	6
III/d	1	1	1	1	-	-	2	2	4
IV/a	2	-	1	-	-	1	3	1	4
IV/b	1	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	8	4	4	1	5	2	17	7	24

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

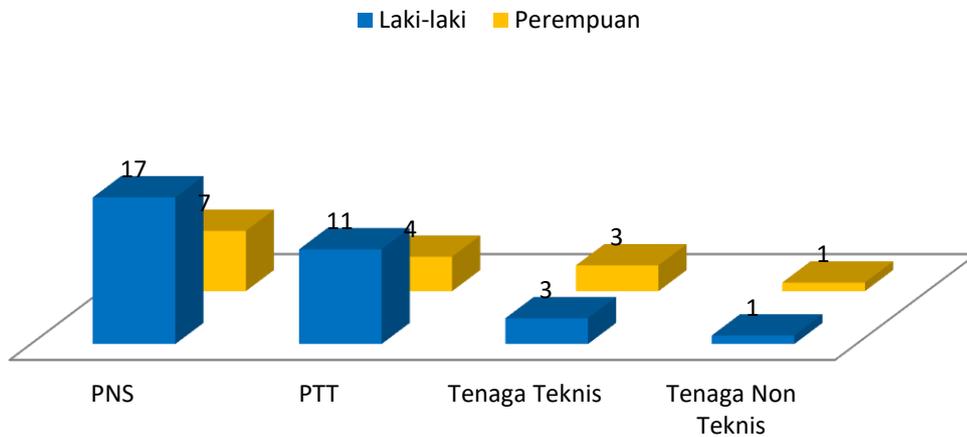
Tabel 2.4.
KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Pegawai	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Bidang Penyelenggaraan e-Government		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
PNS	8	4	4	1	5	2	17	7	24
PTT	4	2	3	1	4	1	11	4	15
Tenaga Teknis	-	1	2	1	1	1	3	3	6
Tenaga Non Teknis	1	1	-	-	-	-	1	1	2
JUMLAH	13	8	9	3	10	4	32	15	42

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

Gambar 2.3.

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 2.5.

DATA DIKLAT STRUKTURAL KEPEMIMPINAN

No.	Jenis Diklat Struktural Kepemimpinan	Jumlah PNS		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Diklat PIM II	-	-	-
2	Diklat PIM III	4	1	5
3	Diklat PIM IV	2	3	5

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

D. SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN RUTINITAS

Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan peralatan dan perlengkapan kantor melalui kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dan sebanyak 81 unit barang yang terdiri dari 15 jenis barang peralatan dan perlengkapan kantor.

Kendaraan dinas/operasional merupakan sarana yang cukup penting bagi aparatur pemerintah karena sangat mendukung kelancaran mobilitas pegawai dalam melaksanakan kegiatan. Pada pertengahan tahun Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan 1 (satu) kendaraan dinas dari BPKPAD yang status penggunaan BMD ditetapkan pada bulan Desember 2018. Jumlah kendaraan dinas/operasional sampai dengan akhir tahun 2 (dua) unit.

Pada akhir Juli 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika menempati gedung ex Kantor Bappeda di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Natuna Gedung B Pulau Senua Lantai 2.

Adapun rincian hasil pengadaan 2018 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.6.
**HASIL PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN 2018**

No.	Nama Barang	Jumlah			
		Banyaknya Barang		Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3		4	5
1	Filling Kabinet	3	Unit	2.750.000	8,250,000
2	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	4.345.000	8,690,000
3	Lemari Kayu	6	Unit	6.700.000	40,200,000
4	Kursi Rapat	20	Unit	891.000	17,820,000
5	AC Split	6	Unit	5.900.000	35,400,000
6	PC Unit	6	Unit	14.960.000	89,760,000
7	Notebook	6	Unit	15.950.000	95,700,000
8	Hard Disk	2	Unit	1.250.000	2,500,000
9	RAM Memory	2	Unit	1.125.000	2,250,000
10	Printer	6	Unit	4.990.000	29,940,000
11	Peralatan Jaringan Komputer	1	Paket	11.861.000	11,861,000
12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Unit	3.520.000	21,120,000
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	5.335.000	5,335,000
14	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	Unit	2.354.000	14,124,000
15	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	3.135.000	6,270,000
16	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	3.135.000	18,810,000
JUMLAH					408.030.000

VISI, MISI TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

A. VISI MISI RPJMD 2016-2021

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna periode 2016-2021 adalah: **“MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN”**

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.

- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.

- Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. **Masyarakat berbudaya** memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensi daerah;
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani;
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan;
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Misi yang terkait terhadap tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah **misi ke-6 yaitu Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat**. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi.

Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu penggunaan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan efektif menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai penataan kewenangan, prosedur standar operasi, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

B.PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PENDUKUNG VISI MISI YANG TERTUANG DALAM RPJMD 2016-2021

Dalam mewujudkan misi ke-6 “Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat”, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan” dengan salah satu sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu “Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi”. Strategi pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran tersebut adalah Reformasi Birokrasi dengan arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur. Adapun program pemerintah daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika (Program Prioritas) yang mendukung visi misi RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 3.1. dibawah..

C. PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERTUANG DALAM RPJMD 2016-2021

Program prioritas memuat program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi kepala daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pagu indikatif yang tertuang di RPJMD 2016-2021 yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra OPD. Program Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 sebagaimana tabel 3.2.:

D. TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS (RENSTRA 2016-2021)

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang yang tertera didalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 adalah:

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dan masyarakat

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government.
2. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.
3. Meningkatnya pengelolaan data statistik daerah.
4. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi.

Tabel 3.1.

**PROGRAM PRIORITAS Mendukung VISI MISI RPJMD
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021
PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode	Misi, Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)
MISI 6	Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat				1,375,000		3,100,000		2,500,000		5,900,000		6,100,000		18,975,000
6.1.	Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan				1,375,000		3,100,000		2,500,000		5,900,000		6,100,000		18,975,000
6.1.2.	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi				1,375,000		3,100,000		2,500,000		5,900,000		6,100,000		18,975,000
1	URUSAN WAJIB				1,375,000		3,100,000		2,500,000		5,900,000		6,100,000		18,975,000
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI				1,375,000		3,100,000		2,500,000		5,900,000		6,100,000		18,975,000
1.16.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah website perangkat daerah	4 Dok, 1 Titik, 16 Website	4 Dok, 3 titik, 18 website, 5 aplikasi	1,375,000	6 Dok, 5 titik, 20 website,	3,100,000	6 Dok, 6 titik, 24 website,	2,500,000	6 Dok, 25 titik, 32 website,	5,900,000	6 Dok, 40 titik, 40 website,	6,100,000	6 Dok, 40 titik, 40 website,	18,975,000
JUMLAH					1,375,000		3,100,000		2,500,000		5,900,000		6,100,000		18,975,000

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021
Lampiran VII

Tabel 3.2.

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016–2021
PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)
1	URUSAN WAJIB														
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI														
1.16.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 bulan	1.692.292	12 bulan	1.168.000	12 bulan	1.235.000	12 bulan	1.321.000	12 bulan	1.393.000	60 Bulan	6.809.292
1.16.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	65%	458.000	65%	419.000	70%	549.000	70%	375.000	75%	660.000	75%	2.461.000
1.16.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	85%	85%	200.000	90%	450.000	90%	-	95%	-	95%	675.000	95%	1.325.000
1.16.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	0%	55%	150.000	60%	250.000	65%	560.000	70%	570.000	75%	580.000	75%	2.110.000
1.16.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	CC/52,58	B/68	75.000	B/70	50.000	BB/74	60.000	BB/76	60.000	A/80	70.000	A/80	315.000
1.16.15.	<u>Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa</u>	Jumlah website perangkat daerah	4 Dok, 1 Titik, 16 Website	4 Dok, 3 titik, 18 website, 5 aplikasi	1.375.000	6 Dok, 5 titik, 20 website, 12 aplikasi	2.750.000	6 Dok, 6 titik, 24 website, 25 aplikasi	2.500.000	6 Dok, 25 titik, 32 website, 52 aplikasi	5.900.000	6 Dok, 40 titik, 40 website, 82 aplikasi	6.100.000	6 Dok, 40 titik, 40 website, 82 aplikasi	18.625.000
		persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	1 PD	1	-	1	350.000	1	-	1	-	1	-	1 PD	350.000
1.16.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	meningkatkan kapasitas SDM di bidang komunikasi dan informatika	6 kelompok, 40 orang	2 kelompok	200.000	3 kelompok	350.000	4 kelompok	700.000	1 kelompok	800.000	1 kelompok	1.050.000	17 kelompok,	3.100.000
		sistem informasi manajemen pemda	28 sistem	33	-	40	250.000	50	400.000	80	400.000	110	450.000	110 sistem	1.500.000
1.16.18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	jumlah surat kabar nasional/lokal	54 jenis	54	-	55	500.000	55	500.000	56	500.000	56	500.000	56 jenis	2.000.000
		meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah	0 media			2 media		2 media		2 media		2 media		8 media	
1.20.	STATISTIK														
1.20.15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	buku "kabupaten dalam angka"	100 exp	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100 exp	1.000.000
		data dan informasi statistik daerah	0	1 informasi		1 informasi		1 informasi		1 informasi		1 informasi		1 informasi	
TOTAL					4,350,292		6,737,000		6,704,000		10,126,000		11,678,000		39,595,292

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016–2021
Lampiran VIII

Tabel 3.3

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir			
							Target	Rp.	Target	Rp.										
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan dan masyarakat	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	Predikat/Nilai akuntabilitas	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 Bulan	12 bulan	1,592,292,000	12 bulan	1,118,000,000	12 bulan	1,235,000,000	12 bulan	1,321,000,000	12 bulan	1,393,000,000	60 Bulan	6,659,292,000		
			01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	0 bulan	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	60 bulan	200,000,000								
			01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	0 bulan	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	60 bulan	250,000,000								
			01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	0 bulan	12 bulan	80,000,000	12 bulan	80,000,000	60 bulan	400,000,000								
			01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	0 bulan	12 bulan	50,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	60 bulan	405,000,000
			01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	0 bulan	12 bulan	60,000,000	12 bulan	60,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	60 bulan	330,000,000
			01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	0 jenis	20 Jenis	667,292,000	6 jenis	188,000,000	6 jenis	200,000,000	8 jenis	250,000,000	10 jenis	322,000,000	50 jenis	1,627,292,000		
			01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	0 bulan	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	60 bulan	75,000,000								
			01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	0 bulan	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	90,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	60 bulan	430,000,000
			01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	0 bulan	12 bulan	300,000,000	12 bulan	300,000,000	12 bulan	310,000,000	12 bulan	316,000,000	12 bulan	316,000,000	12 bulan	316,000,000	60 bulan	1,542,000,000
			01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	0 bulan	12 bulan	160,000,000	12 bulan	160,000,000	12 bulan	180,000,000	12 bulan	180,000,000	12 bulan	180,000,000	12 bulan	180,000,000	60 bulan	860,000,000
			01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	0 bulan	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	120,000,000	12 bulan	120,000,000	12 bulan	120,000,000	60 bulan	540,000,000
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	65%	108,000,000	65%	419,000,000	70%	549,000,000	70%	375,000,000	75%	660,000,000	75%	2,111,000,000		
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	unit	2 unit	50,000,000	3 unit	300,000,000	3 unit	370,000,000	3 unit	70,000,000	1 unit	300,000,000	12 unit	1,090,000,000					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Jumlah bulan penyediaan gedung/gudang kantor	0 bulan	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	60 bulan	270,000,000		
			02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	0 unit	2 unit	10,000,000	5 unit	40,000,000	8 unit	70,000,000	11 unit	100,000,000	12 unit	150,000,000	12 unit	150,000,000	12 unit	370,000,000
			02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 bulan	12 bulan	8,000,000	12 bulan	39,000,000	12 bulan	59,000,000	12 bulan	135,000,000	12 bulan	140,000,000	60 bulan	140,000,000	60 bulan	381,000,000
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	85%	85%	200,000,000	90%	244,000,000	90%	-	95%	-	95%	675,000,000	95%	1,119,000,000		
			03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pakaian dinas harian/upacara	0 stell	40 stell	120,000,000	50 stell	102,000,000	0	-	0	-	150 stell	425,000,000	190 stell	647,000,000		
			03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian hari-hari tertentu	0 stell	40 stell	80,000,000	50 stell	142,000,000	0	-	0	-	150 stell	250,000,000	190 stell	472,000,000		
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	0%	55%	150,000,000	60%	250,000,000	65%	560,000,000	70%	570,000,000	75%	580,000,000	75%	2,110,000,000		
			05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	0 orang	6 orang	150,000,000	8 orang	250,000,000	20 orang	560,000,000	20 orang	570,000,000	20 orang	580,000,000	74 orang	2,110,000,000		
			06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	CC/52,58	B/68	75,000,000	B/70	50,000,000	BB/74	60,000,000	BB/76	60,000,000	A/80	70,000,000	A/80	315,000,000		
			06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja OPD	2 laporan	2 laporan	75,000,000	2 laporan	50,000,000	2 laporan	60,000,000	2 laporan	60,000,000	2 laporan	70,000,000	10 laporan	315,000,000		
			Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-government	15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase instansi pemerintah yang dapat mengakses internet	19,33%	22,69%	1,075,000,000	28,57%	1,850,000,000	37,82%	1,850,000,000	47,06%	4,350,000,000	55,46%	4,550,000,000	55,46%	13,675,000,000
					15.01.	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMP	Jumlah Perda/perbup/juknis	2 dokumen	-	1 Dokumen	350,000,000	-	-	-	-	3 dokumen	350,000,000			
					15.02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah akses internet perkantoran dan publik	0 Titik	3 Titik	625,000,000	1 Titik	300,000,000	2 Titik	600,000,000	16 titik	1,700,000,000	18 titik	1,500,000,000	40 Titik	4,725,000,000
					15.07.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan sistem komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen kajian sistem Informasi daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	-	-	-	-	3 Dokumen	350,000,000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase berita/ informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	15.17.	Pendampingan program/ kegiatan yang bersumber dari APBN/ APBD Provinsi	Jumlah kegiatan yang didampingi	0 kegiatan	2 kegiatan	100,000,000	2 kegiatan	200,000,000	2 kegiatan	250,000,000	2 kegiatan	250,000,000	2 kegiatan	250,000,000	8 kegiatan	1,050,000,000		
			15.18.	Pembangunan infrastruktur e-government	Jumlah organisasi perangkat yang terintegrasi e-gov	0 OPD	-	3 OPD	900,000,000	3 OPD	600,000,000	8 OPD	1,900,000,000	10 OPD	2,200,000,000	24 OPD	5,600,000,000		
			15.19.	Pemeliharaan infrastruktur e-government	Jumlah fasilitas e-gov OPD yang dipelihara	0 OPD	-	1 OPD	100,000,000	2 OPD	200,000,000	3 OPD	300,000,000	4 OPD	400,000,000	10 OPD	1,000,000,000		
			15.20.	Pembangunan dan peningkatan data center	Jumlah server yang ada di data center	0 Unit	0	-	0	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	3 Unit	600,000,000	
			15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-Government	27,91%	39,53%	300,000,000	41,86%	500,000,000	44,19%	250,000,000	46,51%	500,000,000	48,84%	500,000,000	48,84%	2,050,000,000	
			15.13.	Kegiatan Implementasi E-Government	Jumlah layanan e-Government	16 layanan	3 layanan	300,000,000	3 layanan	500,000,000	5 layanan	250,000,000	9 layanan	500,000,000	9 layanan	500,000,000	45 layanan	2,050,000,000	
	Persentase berita/ informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang memiliki berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	37,21%	51,16%	450,000,000	55,81%	350,000,000	60,47%	700,000,000	65,12%	1,200,000,000	69,77%	1,350,000,000	69,77%	4,050,000,000		
				15.05.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi	0 unit	7 unit	150,000,000	0	-	3 unit	150,000,000	5 unit	250,000,000	5 unit	250,000,000	20 unit	800,000,000
				15.08.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	160 artikel	172 artikel	300,000,000	180 artikel	350,000,000	200 artikel	400,000,000	220 artikel	800,000,000	240 artikel	800,000,000	240 artikel	2,650,000,000
				15.21.	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik	Jumlah layanan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat	0 informasi	0 informasi	-	0 informasi	-	12 informasi	150,000,000	24 informasi	150,000,000	48 informasi	300,000,000	48 Informasi	600,000,000
				17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatkan kapasitas SDM di bidang Komunikasi dan Informatika	40 orang	0	-	175 orang	500,000,000	160 orang	400,000,000	225 orang	650,000,000	150 orang	500,000,000	750 orang	2,050,000,000
				17.01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peserta pelatihan komunikasi dan informasi	0 orang	-	75 orang	200,000,000	60 orang	175,000,000	0	-	50 orang	200,000,000	185 orang	575,000,000	
				17.07.	Pelatihan pembuatan Website	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan website	0 Orang	0	-	50 orang	50,000,000	50 orang	75,000,000	50 orang	100,000,000	0	-	150 Orang	225,000,000
				17.08.	Pelatihan administrator e-office	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan administrator e-office	0 Orang	0	-	0	-	50 Orang	150,000,000	100 orang	250,000,000	50 orang	150,000,000	200 Orang	550,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		17.09.	Pelatihan sistem keamanan informasi dan persandian	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan persandian dan sistem keamanan informasi	0 Orang	0	-	0	-	0	0	-	50 orang	150,000,000	50 Orang	150,000,000			
			17.04.	Workshop Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah peserta sosialisasi Internet Sehat	40 Orang	0	-	50 orang	250,000,000	0	-	75 orang	300,000,000	0	-	165 Orang	550,000,000		
			17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase jumlah desa/kelurahan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	0%	2,63%	200,000,000	6,58%	756,000,000	11,84%	400,000,000	13,16%	400,000,000	14,47%	700,000,000	14,47%	2,456,000,000		
			17.02.	Pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	6 Kelompok	2 Kelompok	200,000,000	3 Kelompok	350,000,000	4 Kelompok	400,000,000	1 Kelompok	400,000,000	1 Kelompok	700,000,000	17 Kelompok	2,050,000,000		
			17.06.	Optimalisasi Radio Komunitas	Jumlah radio komunitas	0 Unit	0	-	2 Unit	406,000,000	0	-	0	-	0	-	2 unit	406,000,000		
			18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase aspirasi/opini publik yang ditindaklanjuti tepat waktu	0%	0%	-	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,000,000,000
			18.01.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemda dengan media cetak	Jumlah media cetak yang bermitra dengan pemda	0 media	-	2 media	200,000,000	2 media	200,000,000	2 media	200,000,000	2 media	200,000,000	2 media	200,000,000	8 media	800,000,000	
			18.02.	Pengelolaan aspirasi & Opini Publik	Jumlah opini publik yang di kelola	0	-	30 aspirasi/opini publik	300,000,000	20 aspirasi/opini publik	200,000,000	20 aspirasi/opini publik	200,000,000	20 aspirasi/opini publik	200,000,000	20 aspirasi/opini publik	200,000,000	90 aspirasi/opini publik	900,000,000	
			18.03.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan Keikutsertaan Pameran	Jumlah pameran yang diikuti	0 kali	0 kali	-	0 kali	-	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	6 kali	300,000,000
			Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral	Persentase release data statistik sektoral yang dipublikasikan		15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	0	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%
15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral				0	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	1,000,000,000		
TOTAL								4,350,292,000		6,737,000,000		6,704,000,000		10,126,000,000		11,678,000,000		39,595,292,000		

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB IV

Hasil Pelaksanaan Kegiatan **PEMBANGUNAN**

A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018

Pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) Program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari 11 kegiatan antara lain:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
11. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari 2 kegiatan antara lain:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:

1. Kursus dan Peningkatan keterampilan Aparatur

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain:

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Implementasi e-Government
4. Pembangunan infrastruktur e-government

(6) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:

1. Operasional Kelompok Masyarakat

(7) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:

1. Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik

(8) Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:

1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

☞ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Input dana sebesar Rp 12.000.000,-

Realisasi sebesar Rp 11.900.000,- (99.17%)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat = 12 bulan

Tersedianya belanja materai untuk administrasi perkantoran dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban bendahara.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Input dana sebesar Rp 170.000.000,-

Realisasi sebesar Rp 122.472.571,- (72.04%)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik = 12 bulan

Tersedianya belanja air dan belanja akses internet untuk Dinas Komunikasi dan Informatika untuk satu tahun.

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Input dana sebesar Rp 53.600.000,-

Realisasi sebesar Rp 53.576.000,- (99.96%)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan = 12 bulan

Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan serta honorarium petugas kebersihan.

d) Penyediaan alat tulis kantor

Input dana sebesar Rp 50.000.000,-

Realisasi sebesar Rp 49.914.400,- (99.83%)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor = 12 bulan

Tersedianyan alat tulis kantor untuk administrasi perkantoran.

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input dana sebesar Rp 51.000.000,-

Realisasi sebesar Rp 50.750.000,- (99.51%)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy = 12 bulan

Tersedianya belanja cetak dan penggandaan untuk cetak map Dinas, spanduk dan sebagainya.

f) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Input dana sebesar Rp 477.500.000,-

Realisasi sebesar Rp 412.364.000,- (86.36%)

Menghasilkan Output :

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor = 16 jenis

Tersedianya 16 jenis peralatan dan perlengkapan kantor.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input dana sebesar Rp 15.000.000,-

Realisasi sebesar Rp 15.000.000,- (100%)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai = 12 bulan

Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai antar lain surat kabar harian, mingguan dan tabloid.

h) Penyediaan makanan dan minuman

Input dana sebesar Rp 74.000.000,-

Realisasi sebesar Rp 67.251.000,- (90.88%)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai = 12 bulan

Tersedianya belanja makanan dan minuman pegawai baik harian maupun untuk rapat.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Input dana sebesar Rp 635.400.000,-

Realisasi sebesar Rp 498.736.000,- (78.49%)

Menghasilkan Output :

Jumlah perjalanan dinas luar daerah = 52 OK

Tersedianya belanja perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi ke luar daerah.

j) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Input dana sebesar Rp 518.079.600,-

Realisasi sebesar Rp 465.756.440,- (89.90%)

Menghasilkan Output :

Jumlah Pegawai Tidak Tetap = 21 orang

Tersedianya honorarium untuk pegawai tidak tetap dan honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan dan staf administrasi kegiatan.

k) Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Input dana sebesar Rp 295.771.000,-

Realisasi sebesar Rp 237.837.600,- (80.41%)

Menghasilkan Output :

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah = 142 OK

Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk koordinasi, survey, monitoring dan mengikuti kunjungan kerja ke dalam daerah.

➤ **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan kegiatan :

a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Input dana sebesar Rp 100.000.000,-

Realisasi sebesar Rp 35.839.300,- (35.84%)

Menghasilkan Output :

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara = 2 unit

Tersedianya belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang terdiri dari belanja jasa servis, belanja suku cadang, belanja bahan bakar minyak dan belanja administrasi untuk perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan dinas.

b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Input dana sebesar Rp 20.000.000,-

Realisasi sebesar Rp 11.313.000,- (56.57%)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor = 12 bulan

Tersedianya belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan kegiatan :

a) Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur

Input dana sebesar Rp 180.000.000,-

Realisasi sebesar Rp 77.719.900,- (43.18%)

Menghasilkan Output :

Pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan = 5 orang

Tersedianya belanja kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur yang terdiri penyediaan belanja perjalanan dinas dan belanja kontribusi diklat. Pada tahun ini alokasi kegiatan ini untuk 8 orang pegawai yang dapat melaksanakan diklat, namun hanya terealisasi 5 orang.

⇒ **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan kegiatan :

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input dana sebesar Rp 86.790.000,-

Realisasi sebesar Rp 63.035.500,- (72.63%)

Menghasilkan Output :

Laporan Kinerja OPD = 4 Laporan (LKj 2017, LK 2017, Laporan Tahunan 2017, LK Semester 1 2018)

⇒ **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** dengan kegiatan :

a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Latar belakang

Tidak bisa dipungkiri bahwa internet saat ini menjadi salah satu kebutuhan dasar untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah terutama dalam mengimplementasi e-Government. Semua perangkat daerah tidak terkecuali di Kecamatan dan Desa dituntut untuk menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kondisi geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau terpisah serta tidak terjangkaunya kabel Fiber Optik ke semua Kecamatan yang ada di pulau-pulau dan pulau bungenan besar menjadi kendala utama dalam pengembangan jaringan internet. Untuk menghubungkan akses internet ke Kecamatan-kecamatan menggunakan fiber optik ataupun *radio link* memerlukan biaya yang besar dan membutuhkan waktu. Saat ini jaringan fiber optik milik PT. Telkom baru melayani pelanggan untuk Kecamatan Bungenan Timur dengan jangkauan kabel yang terbatas. Akses internet di kecamatan saat ini hanya di ditunjang

dari internet *mobile*. Namun tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna sudah dilayani akses internet *mobile* dengan layanan 3G. Kondisi ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah yang ada di Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mengakses data/internet.

Tahun 2018 ini semua OPD dan Pemerintah Kecamatan dituntut untuk mengimplementasikan pembayaran mata anggaran secara non tunai (transaksi non tunai). Untuk dapat menjalankan program transaksi non tunai, ketersediaan infrastruktur terutama akses internet haruslah menjadi prioritas utama. Dengan adanya tuntutan untuk menggunakan TIK dalam pemerintahan serta tuntutan untuk mengimplementasikan program transaksi non tunai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dinas yang mempunyai salah satu tupoksi adalah menyediakan akses internet bagi instansi pemerintah dan publik harus mencari solusi dalam penyedia akses internet terutama untuk Kecamatan dan Kelurahan yang tidak terjangkau jaringan fiber optik.

Solusi saat ini untuk akses internet bagi Kecamatan adalah akses internet menggunakan satelit dan akses internet menggunakan *wireless/radio link*. Untuk akses internet menggunakan satelit biaya sangat mahal jika dibandingkan dengan akses internet menggunakan wireless yang biayanya relatif lebih murah. Namun kondisinya tidak semua wilayah/*area* Kabupaten Natuna yang bisa dihubungkan dengan *wireless/radio link*.

Maksud

Menyediakan akses internet bagi Kantor Kelurahan Sedanau dan Kantor Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna

Tujuan

1. Menyediakan infrastruktur layanan data.
2. Menyediakan layanan akses data dalam mendukung program transaksi non tunai.
3. Menyediakan layanan akses data dalam menunjang kinerja Kecamatan dan Kelurahan serta penyediaan akses internet bagi publik/masyarakat umum.

Sasaran

Tersedianya akses internet di 14 (empat belas) kecamatan dan 1 (satu) kelurahan, sehingga diharapkan dapat membantu kinerja pemerintah daerah di kecamatan dalam mengimplementasikan e-Government di Kabupaten Natuna khususnya pada program transaksi non tunai.

Keluaran

Tersedianya akses internet perkantoran dan publik

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi ini adalah menyediakan akses internet menggunakan vsat (*Very Small Aperture Terminal*) menggunakan kuota dan penyediaan akses internet menggunakan *wireless/radio link*. selain itu juga menyediakan router dan perlengkapan lainnya. Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Akses Internet Kantor Camat Kecamatan Bunguran Barat.

Pekerjaan ini merupakan penyediaan akses internet menggunakan *wireless/radio link* pada Kantor Camat Bunguran Barat di Pulau Sedanau. Pemilihan akses internet menggunakan *wireless/radio link* dimaksudkan untuk memperoleh *bandwidth* yang lebih besar dibandingkan dengan penyediaan akses internet menggunakan vsat. Sehingga anggaran yang tersedia lebih dimaksimalkan untuk mendapatkan *bandwidth* yang lebih besar. Akses internet ini disediakan untuk menunjang program transaksi non tunai dan kinerja lainnya. Selain itu akses internet ini juga akan disediakan bagi masyarakat Pulau Sedanau sebagai *pilot project* Natuna *Smart Island* dengan menyediakan *wifi* gratis diluar jam kerja dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya. Pemilihan Pulau Sedanau sebagai *pilot project* Natuna *Smart Island* dikarenakan pulau tersebut adalah satu satunya pulau di Kabupaten Natuna yang pengoperasian listrik PLN sudah 24 jam. Sehingga penyediaan akses internet juga lebih mudah. Pada pekerjaan ini juga akan dilakukan sosialisasi kepada pegawai kantor Camat Bunguran Barat dan masyarakat tentang penggunaan internet sehat dan aman (insan).

Output yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya akses internet bagi Kantor Camat Bunguran Barat serta penyediaan wifi gratis.

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 8 (delapan) bulan dan berakhir pada bulan Desember 2018.

2. Belanja Akses internet Kantor Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dan 13 Kecamatan di Kabupaten Natuna.

Pekerjaan ini merupakan penyediaan akses internet menggunakan Vsat berbasis kuota pada 1 (satu) Kelurahan dan 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Akses internet ini disediakan untuk menunjang program transaksi non tunai kinerja Kantor Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dan Kantor Camat Bunguran Tengah, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, Bunguran Batubi, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Midai, Suak Midai, Serasan, Serasan Timur, Subi, dan Pulau Laut. Untuk akses internet ini Dinas Komunikasi dan informatika tidak menyediakan wifi gratis bagi masyarakat setempat mengingat akses internet ini berbasis kuota, sehingga pemakaian hanya untuk mendukung pelaksanaan program transaksi non tunai serta menunjang kinerja pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dalam hal lainnya.

Output yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya akses internet bagi kelurahan sedanau serta 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Pemakaian akses internet pada pekerjaan ini selama 2 (dua) tahun dan menggunakan kontrak tahun jamak yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada pada tahun 2018.

3. Belanja Router dan Peralatan Lainnya.

Pekerjaan ini merupakan pengadaan router dan peralatan lainnya untuk mendukung penyediaan akses internet.

Output yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya router dan peralatan lainnya untuk mendukung penyediaan akses internet.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan akan dijabarkan tiap-tiap paket pekerjaan, yaitu :

I. Belanja Akses internet Kantor Camat Kecamatan Bunguran Barat.

▪ Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan paket Belanja Akses Internet Kantor Camat Kecamatan Bunguran Barat dilakukan secara pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan.

▪ Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pekerjaan paket Belanja Akses Internet Kantor Camat Kecamatan Bunguran Barat berada di Sedanau Kecamatan Bunguran Timur.

▪ Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan pekerjaan selama 4 (empat) bulan.

▪ Proses Pengadaan

Proses pengadaan langsung pada tanggal 15 Agustus 2018, setelah dilakukan proses pengadaan langsung maka penyedia yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Telkom Indonesia.

Alamat : Jl. Jaksa Agung R. Soerapto, Sekupang Batam

Harga Penawaran : Rp. 82.808.000,-

Harga Negosiasi : Rp. 82.750.000,-

Waktu Pelaksanaan : 4 (empat) Bulan

▪ Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Tahap pemasangan jaringan .

Pemasangan jaringan kabel fiber optik yang dilakukan oleh penyedia dalam hal ini PT. Telkom Ranai melalui site Telkomsel menuju kantor Camat Bunguran Barat melalui tiang PLN.

2. Tahap Pemasangan akses poin

Tahap pemasangan akses poin dalam rangka penyebaran akses internet di Kantor Camat Bunguran Barat. Akses poin yang dipasang adalah hasil pengadaan dari belanja router dan peralatan lainnya. Pemasangan akses point ini dilakukan oleh staf bidang penyelenggaraan e-government.

3. Tahap pembuatan dan pembagian user id

Semua pejabat dan staf di Kantor Camat Bunguran Barat dibuatkan 1 (satu) user untuk bisa mengakses internet. Selain itu juga disediakan wifi gratis bagi masyarakat Sedanau untuk mengakses internet diluar jam kerja.

2. Belanja Akses Internet Kantor Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dan 13 Kecamatan di Kabupaten Natuna.

Pekerjaan Belanja Akses Internet Kantor Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dan 13 Kecamatan di Kabupaten Natuna tidak terlaksana di tahun 2018.

3. Belanja Router dan Peralatan Lainnya.

Belanja router dan peralatan lainnya merupakan belanja perangkat/ peralatan untuk mendukung penyambungan akses internet dari Kantor Camat Kecamatan Bunguran Barat ke Kantor Lurah Sedanau. Penyambungan akses internet ini di lakukan karena belanja akses internet Kantor Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dan 13 kecamatan di Kabupaten Natuna tidak terlaksana, sehingga dilakukan penyambungan akses internet melalui kabel FO yang di tarik dari Kantor Camat Bunguran Barat. Adapun peralatan di yang dibeli melalui surat pesanan adalah sebagai berikut:

1. Router 1 Unit
2. Media Converter 2 Pair
3. Akses Poin 4 Unit
4. Kabel FO Dropcore (Kabel FO 200 M drop wire DW core Optik FTTH SC UPC) 1 Roll
5. Kabel FO Dropcore (Kabel FO 1 Core panjang 100 M lengkap konektor SC UPC) 2 Roll
6. Kabel UTP CAT6 1 Roll
7. RJ45 CAT6 1 Pack
8. Crimping Tool 1 Unit
9. Klem 15 Unit

Realisasi Fisik dan Keuangan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 1.084.654.000,- (*satu milyar delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu*) yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai	: Rp	39.600.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	1.010.054.000,-
- Belanja Modal	: Rp	35.000.000,-

Setelah dilakukan perubahan anggaran pada APBD perubahan (APBDP) dilakukan pengurangan anggaran terhadap paket yang tidak terlaksana pada tahun 2018 sehingga pagu kegiatan menjadi Rp. 254.922.000,- (*dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai	: Rp	36.600.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	206.322.000,-
- Belanja Modal	: Rp	12.000.000,-

Dengan realisasi keuangan sebesar:

- Belanja Pegawai	: Rp	33.800.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	89.149.988,-
- Belanja Modal	: Rp	11.861.000,-
- Total Realisasi	: Rp	134.810.988,-

Realisasi fisik kegiatan ini telah sebesar 66% (enam puluh enam) persen

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

a. Hambatan/kendala

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah ketidakjelasan mengenai anggaran untuk menjalankan kegiatan.

b. Solusi Pemecah Masalah

Harus ada kejelasan dari awal tahun mengenai ketersediaan anggaran, sehingga awal tahun dinas dapat menjalankan kegiatan sehingga output kegiatan dapat terealisasi.

b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Latar belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya yang luas, membuka peluang bagi pengkasesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dan volume yang besar secara cepat dan akurat. Hal ini disadari oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna untuk mengembangkan pelayanan informasi dan promosi elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan media website. Adapun fungsi paling dasar dari website adalah sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga, website menjadi lebih matang sebagai media interaktif dalam membuat interface keterhubungan dengan lembaga lain, website dibangun untuk memberikan informasi pelayanan publik, pemanfaatan website yang mengutamakan untuk pelayanan yang bersifat Government to government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumer (G2C).

Maksud dan Tujuan

1. Pelaksanaan pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Natuna melalui media website dilakukan secara efektif dengan kualitas dan tingkat updating yang baik.
2. Masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang Kabupaten Natuna secara mudah dan tidak berbiaya.
3. Masyarakat bisa dengan mudah mengidentifikasi dan menelusuri content/fitur pelayanan dalam website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
4. Memberikan layanan bantuan help desk guna memperlancar jalannya pemakaian system tanpa menghambat kualitas pelayanan di Portal Pemerintah Kabupaten Natuna.
5. Memberikan kualitas sistem informasi yang baik guna mendukung kecepatan pelayanan, kecepatan respon ke publik dan peningkatan kualitas pelayanan secara umum.

6. Terwujudnya situs website OPD yang dinamis terupdate secara rutin.

Keluaran

Jumlah dan berita/artikel penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui website Pemda Natuna maupun website Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan selama tahun 2018 sebanyak 391 artikel. Pelaksanaan pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Natuna melalui media website dilakukan secara efektif dengan kualitas dan tingkat updating yang baik.

Ruang Lingkup

▪ Penyiapan bahan website

Untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan diupload ke dalam website Pemerintah Kabupaten Natuna dan website Dinas Komunikasi dan Informatika selain melakukan kerjasama dengan Bagian Kehumasan Kabupaten Natuna, pengelola juga membentuk team pencari/penulis berita, artikel dan opini dengan berbagai bahan informasi baik dari lingkup internal stakeholder di Kabupaten Natuna maupun bahan-bahan yang ada di internet serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

▪ Mengupload berita/artikel/opini melalui website

Data/informasi baik berupa berita/artikel/opini yang didapat dikoreksi terlebih dahulu oleh editor dan disetujui oleh redaktur sebelum diupload ke website. Dalam penyajian informasi baik berupa berita/artikel/opini dikemas dengan baik supaya menjadi sebuah informasi yang menarik dan memiliki nilai guna bagi si pembaca, mengandung keunikan, keluarbiasaan, penting dan sesuatu yang baru. Artikel/berita/opini diperoleh dari pengambilan dokumentasi, pembuatan naskah dan diupload ke website dimana artikel/berita/opini yang dibuat berisikan berbagai macam kegiatan pemerintah daerah. Informasi yang didapatkan dan diberitakan benar-benar terbaru/terkini dan akurat.

Realisasi Fisik dan Keuangan

Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 301.733.000,- (*tiga ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai	: Rp	31.200.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	270.533.000,-

Dengan realisasi keuangan sebesar:

- Belanja Pegawai	: Rp	26.700.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	80.738.000,-
- Total Realisasi	: Rp	107.438.000,-

Kesimpulan

Mulai dari Januari s/d Desember tahun 2018, telah dilakukan pengelolaan website baik itu website Pemerintah Kabupaten Natuna maupun website Dinas Kominfo sebagai salah satu media komunikasi dan penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan website ini disamping melakukan perubahan-perubahan terhadap menu juga terhadap tampilan website, demikian juga halnya dengan isi berita/artikel/opini yang selalu terupdate dengan berbagai macam informasi yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Namun realisasi penyerapan anggaran hanya 35.61% dari anggaran yang tersedia sementara output yang dihasilkan sebanyak 391 artikel dari target 600 artikel atau 65,17%, hal ini disebabkan karena ketidakjelasan dana yang tersedia sementara anggaran di dalam DPA tidak mengalami perubahan.

c) Kegiatan Implementasi e-Government

Latar belakang

Pemanfaatan TIK dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi dengan baik masih belum sepenuhnya optimal, padahal secara teoritis terdapat banyak manfaat dan kemudahan yang bisa dirasakan. Implementasi e-government yang belum optimal karena terdapat beberapa kendala diantaranya kemampuan manajerial pemerintah yang sebagian besar tidak memiliki basis pengetahuan TIK.

Dalam rangka pelaksanaan proses pemerintahan yang akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan, maka perlu adanya suatu sistem proses pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut e-Government.

Implementasi e-Government perlu segera dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kinerja aparatur pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Di beberapa daerah Implementasi e-government sudah mulai diterapkan dan dirasakan manfaatnya baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dimana pelayanan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Natuna Implementasi e-government sudah mulai diterapkan beberapa tahun terakhir. Baik yang diadakan sendiri maupun yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan instansi-instansi teknis lainnya. Hanya permasalahan yang ada aplikasi masih bersifat offline, dan masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mempergunakan aplikasi dalam menunjang kinerjanya, sehingga strategi yang ingin dicapai dari penerapan e-government belum terlaksana.

Atas kondisi tersebut, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diberikan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna mengupayakan untuk membangun sistem aplikasi yang berbasis internet, tidak hanya di lingkup OPD teknis juga terkoneksi di Pemerintah Pusat. Sebagai langkah awal Implementasi e-Government pada tahun 2018 ini direncanakan akan di mulai di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Kegiatan Implementasi e-government adalah terlaksananya sosialisasi aplikasi SiMaya (e-office) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dan perpanjangan jasa dedicate server untuk mendukung pelaksanaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Tujuan dari kegiatan Implementasi e-Government diantaranya:

- a. Dipergunakannya aplikasi SiMaya (e-office) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dalam rangka penerapan e-government.

- b. Perpanjangan jasa dedicate server untuk mendukung kegiatan publikasi informasi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka keterbukaan informasi publikasi.

Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Implementasi e-Government yaitu :

1. Terwujudnya perpanjangan jasa dedicate server yang mendukung layanan website pada pemerintah Kabupaten Natuna (natunakab.go.id)
2. Terwujudnya penerapan Aplikasi SiMaya yang mendukung layanan persuratan secara elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup kegiatan Implementasi e-government yaitu untuk menunjang kinerja Organisasi Perangkat Daerah (e-government) antara lain dengan melakukan :

- Sosialisasi SiMaya pada pejabat dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;
- Uji Coba pelaksanaan SiMaya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;
- Pembuatan layanan subdomain OPD pada domain natunakab.go.id;
- Pembuatan email pada organisasi perangkat daerah serta pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna;
- Perpanjangan jasa dedicate server;
- Upgrade Hard disk server e-Government.

Waktu Pelaksanaan

12 (dua belas) bulan.

Tim Penyelenggara Kegiatan

- a. Panitia Pelaksana Kegiatan adalah panitia yang diangkat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang melibatkan unsur-unsur seperti Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Staf Diskominfo Kabupaten Natuna;

- b. Tim Implementasi SiMaya (e-office) yang terdiri atas 1 (satu) orang Admin Kabupaten dan 1 (satu) orang Admin OPD;
- c. Pengelolaan Domain dan Sub Domain yang terdiri atas 1 (satu) orang Web Admin dan 1 (satu) orang Web Maintenance;
- d. Narasumber kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis e-office (SiMAYA) yaitu 2 (dua) orang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Tanggung Jawab dan Tugas Penyelenggaraan Kegiatan

- a. Panitia Pelaksana Kegiatan
Bertugas melakukan persiapan dalam pelaksanaan sosialisasi Aplikasi SiMaya pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;
- b. Tim Implementasi SiMaya (Admin Kabupaten dan Admin OPD)
Admin Kabupaten bertugas sebagai admin kabupaten Natuna dalam aplikasi Simaya. Admin OPD bertugas sebagai admin lokal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.
- c. Pengelolaan Domain dan Sub Domain (Web Admin, Web Maintenance)
Web Admin bertugas :
 - 1. Membuat Subdomain;
 - 2. Merubah nama / alamat subdomain;
 - 3. Menyediakan content untuk data website;
 - 4. Mengkoordinasi user yang logging pada website;
 - 5. Menyeleksi konten yang terdapat pada website;
 - 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
Web Maintenance bertugas :
 - 1. Memelihara konten server natunakab;
 - 2. Memback up data server natunakab;
 - 3. Untuk menjaga keamanan hardisk, memori server, menginstal atau update softwer di server dan lain-lain yang berkaitan dengan konten server;
 - 4. Membuat laporan pelaksanaan tugas.

d. Narasumber

Memberikan sosialisasi dan penerapan Aplikasi SiMaya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.

Pelaksanaan

1. Domain

Perpanjangan Domain dilakukan melalui PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Mandiri KC Jakarta

No. Rekening : 122.0004848.647

Dengan Alamat : Wisma Indosemen Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70 -71
Jakarta 12910

Keterangan : Perpanjangan Nama Domain natunakab.go.id

Domain natunakab.go.id telah diperpanjang pada 4 Januari 2018.

Domain tersebut akan jatuh tempo tanggal 20 Maret 2019.

Apabila perpanjangan domain ini tidak dilaksanakan maka semua subdomain yang ada dalam natunakab.go.id akan mengalami gangguan/kendala sehingga pelayanan efektif, efisien dan akuntabilitas tidak dapat terwujud.

2. Belanja Jasa Dedicare Server

Nama Program : Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa

Nama Kegiatan : Implementasi e-government

Nama Pekerjaan : Belanja Kawat/Faksimili/Internet
(Belanja Jasa Dedicare Server)

Nomor SPK : 02/SPK/KOMINFO/V/2018

Tanggal SPK : 18 Mei 2018

Nama Perusahaan : PT. MORBI DATA RISET INDONESIA

Alamat Perusahaan : Jl. Batu Ampar IV No. 12B RT. 009 RW. 003
Batu Ampar Kramat Jati – Jakarta Timur

Pelaksanaan Pekerjaan : 24 Mei 2018 s/d 23 Mei 2019

3. Sosialisasi dan Bimbingan teknis SiMaya



Sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi perkantoran siMaya dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa s/d Rabu /17-18 Juli 2018

Jam : 08.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Bidang Penyelenggaraan E-Government

Narasumber : 1. Bpk. Dirgantara Manurung
2. Bonova Suharko

Narasumber kegiatan Ini berasal dari Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Adapun jumlah peserta sebanyak 25 orang, yaitu para pejabat eselon II, III dan IV serta staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Aplikasi SiMaya merupakan aplikasi administrasi perkantoran berbasis cloud. Dengan aplikasi ini proses manajemen persuratan yang biasa dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis, sehingga

mudah dalam proses administrasi, pencarian dan pengarsipannya. Aplikasi SiMaya dapat diakses melalui www.simaya.go.id.

4. Cpanel & e-mail



Jumlah Cpanel yang sudah didistribusikan kepada Desa/ Kelurahan, Organisasi Pemerintah serta Instansi Vertikal sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 52 Cpanel. Sedangkan

jumlah website sebagai berikut :

- Organisasi Perangkat Daerah : 29 Website
- Kelurahan : 1 Website
- Desa : 3 Website
- Organisasi : 1 Website
- Instansi Vertikal : 1 Website

Tabel 4.1.
DAFTAR CPANEL, WEBSITE & e-MAIL

NO.	INSTANSI	No Urut	WEBSITE	EMAIL	CPANEL	WEBSITE
1	PEMKAB NATUNA	1.	https://natunakab.go.id	natuna@natunakab.go.id	Cpanel	Website
SEKRETARIAT DAERAH						
2	SEKRETARIAT DAERAH	2.	https://setda.natunakab.go.id	humas@natunakab.go.id	Cpanel	Website
3	BAGIAN HUKUM	3.	https://jdih.natunakab.go.id	jdih@natunakab.go.id	Cpanel	Website
4	UNIT LAYANAN PENGADAAN	4.	https://utp.natunakab.go.id	blp@natunakab.go.id	Cpanel	Website
5	LPSE	5.	https://lpse.natunakab.go.id/	natunalpse@yahoo.co.id	Cpanel	Website
BADAN / DINAS						
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.	https://diskominfo.natunakab.go.id	diskominfo@natunakab.go.id	Cpanel	Website
		7.	https://wifi.natunakab.go.id	admin@natunakab.go.id	Cpanel	-
		8.	https://geopark.natunakab.go.id	geopark@natunakab.go.id	Cpanel	-
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYANAN	9.	https://disparbud.natunakab.go.id	disparbud@natunakab.go.id	Cpanel	Website
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10.	https://disdukcapil.natunakab.go.id	disdukcapil@natunakab.go.id	Cpanel	Website
9	DINAS PERHUBUNGAN	11.	https://dishub.natunakab.go.id	dishub@natunakab.go.id	Cpanel	Website
10	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12.	https://bkpp.natunakab.go.id	bkpp@natunakab.go.id	Cpanel	Website
11	RSUD	13.	https://rsud.natunakab.go.id	rsud@natunakab.go.id	Cpanel	Website
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	14.	https://dpad.natunakab.go.id	kpad@natunakab.go.id	Cpanel	Website
13	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15.	https://bp3d.natunakab.go.id	bp3d@natunakab.go.id	Cpanel	Website
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.	https://dpmd.natunakab.go.id	dpmd@natunakab.go.id	Cpanel	Website
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.	https://dpmpstp.natunakab.go.id	dpmpstp@natunakab.go.id	Cpanel	Website
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	18.	https://disperindagkopum.natunakab.go.id	disperindagkopum@natunakab.go.id	Cpanel	Website
17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	19.	https://bpkpad.natunakab.go.id	bpkpad@natunakab.go.id	Cpanel	Website
		20.	http://sikekah.natunakab.go.id	admin@sekekah.natunakab.go.id	Cpanel	Website
18	DINAS PERIKANAN	21.	https://diskan.natunakab.go.id	diskan@natunakab.go.id	Cpanel	Website
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	22.	https://dkp.natunakab.go.id/	dkp@natunakab.go.id	Cpanel	Website
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23.	https://dpupr.natunakab.go.id	dpupr@natunakab.go.id	Cpanel	Website
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	24.	https://disdamkar.natunakab.go.id	disdamkar@natunakab.go.id	Cpanel	Website
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	25.	https://disnakertrans.natunakab.go.id	disnakertrans@natunakab.go.id	Cpanel	Website
23	INSPEKTORAT	26.	https://inspektorat.natunakab.go.id	inspektorat@natunakab.go.id	Cpanel	Website
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.	https://dth.natunakab.go.id	dth@natunakab.go.id	Cpanel	Website
25	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	28.	https://www.disdikpora.natunakab.go.id	disdikpora@natunakab.go.id	Cpanel	Website
26	SEKRETARIAT DPRD	29.	https://setwan.natunakab.go.id	setwan@natunakab.go.id	Cpanel	Website
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	30.	https://disperkim.natunakab.go.id	disperkim@natunakab.go.id	Cpanel	-
28	DINAS PERTANIAN	31.	https://distan.natunakab.go.id	distan@natunakab.go.id	Cpanel	-
KECAMATAN						
29	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	32.	https://kecamatanbunguranselatan.natunakab.go.id	kecamatanbunguranselatan@natunakab.go.id	Cpanel	-
30	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI	33.	https://kecamatanbunguranbatubi.natunakab.go.id	kecamatanbunguranbatubi@natunakab.go.id	Cpanel	-
31	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	34.	https://kecamatanbungurantimur.natunakab.go.id	kecamatanbungurantimur@natunakab.go.id	Cpanel	-
32	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	35.	https://kecamatanbunguranbarat.natunakab.go.id	kecamatanbunguranbarat@natunakab.go.id	Cpanel	-
33	KECAMATAN MIDAI	36.	https://kecamatanmidai.natunakab.go.id	kecamatanmidai@natunakab.go.id	Cpanel	Website
34	KECAMATAN PULAU TIGA	37.	https://kecamatanpulautiga.natunakab.go.id	kecamatanpulautiga@natunakab.go.id	Cpanel	Website
35	KECAMATAN PULAU LAUT	38.	https://kecamatanpulaulaut.natunakab.go.id	kecamatanpulaulaut@natunakab.go.id	Cpanel	Website
36	KECAMATAN SUAK MIDAI	39.	https://kecamatan-suakmidai.natunakab.go.id	kecamatan-suakmidai@natunakab.go.id	Cpanel	Website
37	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	40.	https://kecamatanbungurantengah.natunakab.go.id	kecamatanbungurantengah@natunakab.go.id	Cpanel	-
38	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	41.	https://kecamatanbungurantimurlaut.natunakab.go.id	kecamatanbungurantimurlaut@natunakab.go.id	Cpanel	-
DESA / KELURAHAN						
39	KELURAHAN RANAI	42.	https://www.kelurahanranai.natunakab.go.id	kelurahanranai@natunakab.go.id	Cpanel	-
40	KELURAHAN BANDARSYAH	43.	https://kelurahanbandarsyah.natunakab.go.id	kelurahanbandarsyah@natunakab.go.id	Cpanel	-
41	KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT	44.	https://kelurahanseudanau.natunakab.go.id	kelurahanseudanau@natunakab.go.id	Cpanel	Website
42	DESA SEPEMPANG	45.	https://desasepempang.natunakab.go.id	desasepempang@natunakab.go.id	Cpanel	Website
43	DESA TANJUNG	46.	https://desatanjung.natunakab.go.id	desatanjung@natunakab.go.id	Cpanel	Website
44	DESA PENGADAH	47.	https://desapengadah.natunakab.go.id	desapengadah@natunakab.go.id	Cpanel	-
45	DESA MEKAR JAYA	48.	https://desamekarjaya.natunakab.go.id	desamekarjaya@natunakab.go.id	Cpanel	Website
ORGANISASI PEMERINTAHAN						
46	PKK	49.	https://www.pkk.natunakab.go.id	pkk@natunakab.go.id	Cpanel	-
47	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN NATUNA	50.	https://baznas.natunakab.go.id	baznas@natunakab.go.id	Cpanel	Website
48	DEKRANASDA KABUPATEN NATUNA	51.	https://dekranasda.natunakab.go.id	dekranasda@natunakab.go.id	Cpanel	-
INSTANSI VERTIKAL						
49	BADAN PUSAT STATISTIK	52.	https://www.bps.natunakab.go.id/	bps2103@bps.go.id	Cpanel	Website

Realisasi Fisik dan Keuangan

Kegiatan Implementasi e-Government mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 254.290.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai	: Rp	27.600.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	221.790.000,-
- Belanja Modal	: Rp	4.900.000,-

Setelah ada perubahan anggaran kegiatan Implementasi e-government Tahun Anggaran 2018 mengalami penambahan menjadi Rp. 339.175.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rician sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	: Rp	36.600.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	300.675.000,-
- Belanja Modal	: Rp	4.900.000,-

Dengan realisasi keuangan sebesar:

- Belanja Pegawai	: Rp	27.600.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	176.336.500,-
- Belanja Modal	: Rp	4.750.000,-
- Total Realisasi	: Rp	208.686.500,-

Evaluasi terhadap pelaksanaan

a. Keberhasilan

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sudah mendapat izin untuk pemakaian/penggunaan aplikasi e-office (SiMaya) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
2. Sudah ditugaskan admin pengelola aplikasi e-office (SiMaya) di :
Admin Kabupaten Natuna : Heru Setiawan, S.IP
Admin OPD (Diskominfo): Bahtiar, SH yang digantikan oleh Shanty Octaviani, S.IP
3. Sudah dibangun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada aplikasi e-office (SiMaya).
4. Sudah dilakukan Sosialisasi dan Bimbingan Pelatihan aplikasi e-office (SiMaya) kepada para pejabat dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.

5. Aplikasi e-office (SiMaya) sudah diuji cobakan dan siap untuk diterapkan.

b. Hambatan/Kendala

Bahwa aplikasi simaya belum sepenuhnya dapat diimplementasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dikarenakan :

- Akses internet yang masih sangat kurang cepat atau sangat lambat (kapasitas bandwidth perlu ditingkatkan) mengingat sarana penunjang utama aplikasi simaya adalah akses internet.
- Ketersediaan perangkat Komputer / Laptop /Ipad / Handphone yang memiliki kapasitas cukup besar mengingat aplikasi simaya diterapkan berbasis online dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh para pengguna.

➔ **Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi** dengan kegiatan :

Operasional Kelompok Masyarakat

Latar Belakang

Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan di era globalisasi saat ini, sehingga disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan secara efektif mulai diberlakukan pada bulan April 2010. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan, pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan sebagaimana tertuang pada pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi , yaitu Transparansi menuju *Clean Government* dan *Good Governance*.

Bahwa di setiap Kelurahan/Desa perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai jembatan informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

Maksud dan tujuan

Sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur untuk pelaksanaan kegiatan yang sama dan tujuan adalah memberikan gambaran serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas telah terlaksananya Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat (OKM) Tahun Anggaran 2018 kepada semua pihak yang terkait.

Jangka waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 10 (sepuluh) bulan.

Pelaksanaan kegiatan

Dalam kurun waktu sebelumnya, KIM yang sudah terbentuk di Kabupaten Natuna ada 9 (sembilan) kelompok, antara lain :

1. KIM Serasan Timur, dari Kec. Serasan Timur;
2. KIM Serasan, dari Kec. Serasan;
3. KIM Subi, dari Kec. Subi;
4. KIM Midai, dari Kec. Midai;
5. KIM Zamrud dari Kec. Bunguran Utara;
6. KIM Pulau Laut, dari Kec. Pulau Laut;
7. KIM Sahabat Senué, dari Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur;
8. KIM Ceruk, dari Desa Ceruk Kec. Bunguran Timur Laut; dan
9. KIM Pasei Maghos, dari Kelurahan Sedanau Kec. Bunguran Barat.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2018, terbentuk 14 (empat belas) KIM :

1. KIM Mekar Jaya, dari Desa Mekar Jaya, Kec. Bunguran Barat (dibentuk secara mandiri);
2. KIM Radar, dari Kelurahan Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur;
3. KIM Serindit, dari Kelurahan Ranai, Kec. Bunguran Timur;
4. KIM Bandarsyah, dari Kelurahan Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur;
5. KIM Batu Merang, dari Desa Tanjung, Kec. Bunguran Timur Laut;

6. KIM Marwah, dari Desa Kelanga, Kec. Bunguran Timur Laut;
 7. KIM Sengiap, dari Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut;
 8. KIM Teluk Selahang, dari Desa Limau Manis, Kec. Bunguran Timur Laut;
 9. KIM Tok Nyong, dari Desa Selemam, Kec. Bunguran Timur Laut;
 10. KIM Putri Bertuah, dari Desa Gunung Putri, Kec. Bunguran Batubi;
 11. KIM Tanjung Dara, dari Desa Semedang, Kec. Bunguran Batubi;
 12. KIM Sahabat Batubi, dari Desa Batubi Jaya, Kec. Bunguran Batubi;
 13. KIM Pilar Cerdas, dari Desa Sedarat Baru, Kec. Bunguran Batubi; dan
 14. KIM Ketam Mangok, dari Desa Sedanau Timur, Kec. Bunguran Batubi.
- => Sehingga total KIM di Kabupaten Natuna berjumlah 23 Kelompok.

KIM Mekar Jaya (Desa Mekar Jaya, Kec. Bunguran Barat) yang dibentuk dengan sendiri secara mandiri yang digagas oleh masyarakat di desa tersebut. KIM Mekar Jaya dibentuk pada tanggal 02 Mei 2018, sebagaimana Surat Keputusan



Kepala Desa Mekar Jaya-Kec. Bunguran Barat, No. 20 Tahun 2018.

Kemudian untuk KIM di Kec. Bunguran Timur, antara lain : KIM Radar (Kel. Ranai Darat), KIM Serindit (Kel. Ranai), dan KIM Bandarsyah dibentuk secara bersama-sama pada tanggal 09 Mei 2018 di Aula Kec. Bunguran

Timur- Ranai.

Selanjutnya pada tanggal 04 September 2018, bertempat di Aula Kec. Bunguran Timur Laut - Tanjung. Terbentuklah KIM dari Kecamatan Bunguran Timur Laut, antara lain : KIM Batu Merang (Desa Tanjung), KIM Marwah (Desa Kelanga), KIM Sengiap (Desa Pengadah), KIM Teluk Selahang (Desa Limau Manis), dan KIM Tok

Nyong (Desa Selemam).

Terakhir, KIM dari Kec. Bunguran Batubi, antara lain : KIM Putri Bertuah (Desa Gunung Putri), KIM Tanjung Dara (Desa Semedang), KIM Sahabat Batubi (Desa Batubi Jaya), KIM Pilar Cerdas (Desa Sedarat Baru), dan KIM Ketam Mangok (Desa Sedanau Timur).

Realisasi anggaran kegiatan

Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 203.266.500,- (*dua ratus tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai	: Rp	22.500.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	180.766.500,-

Dengan realisasi keuangan sebesar:

- Belanja Pegawai	: Rp	17.500.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	19.921.700,-
- Total Realisasi	: Rp	37.421.700,-

Dari total serapan anggaran sebesar Rp 37.421.700,-, yang hanya sebesar 18,41%. Hal ini terjadi akibat kondisi Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 mengalami kendala sehingga pembentukan KIM di Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat ditunda pelaksanaannya dan pembinaan KIM yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018.

Dari sisi target keluaran atas kegiatan OKM ini terbentuknya KIM sejumlah 3 Kelompok dapat tercapai dan melebihi target. Karena dari 3 (tiga) Kecamatan yang dibentuk : Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, dan Kec. Bunguran Batubi, KIM dapat dibentuk sebanyak 14 (empat belas) Kelompok.

Hambatan/Kendala

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di lingkungan masyarakat antara lain :

1. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap nilai suatu informasi yang ada;
2. Masih rendahnya jaringan komunikasi di wilayah tertentu guna menunjang penerimaan dan penyebaran suatu informasi;

3. Masih rendahnya kepedulian terhadap sarana prasarana yang ada; dan
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat atas lintasan peluang yang ada, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup.

Kesimpulan

Pola pemberdayaan KIM dalam menyukseskan semua program yang ada, hendaknya dilakukan dalam suatu kerjasama yang sinergi dengan seluruh stakeholders antara Pemerintah Daerah (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa), Lembaga Swadaya Masyarakat (BPD), Swasta, Perguruan Tinggi, Pers dan lain-lain. Oleh karena itu figur yang ideal memimpin lembaga KIM di masa mendatang adalah yang menguasai prinsip-prinsip komunikasi yang baik serta dalam penguasaan TIK sebagai sarana penunjang meningkatkan kesadaran publik dan memahami dinamika semua atas kebutuhan masyarakat.

⇒ **Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media** dengan kegiatan :

Pengelolaan aspirasi dan opini publik

Latar Belakang

Opini publik adalah pendapat dari kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat yang didapatkan dari sebuah diskusi sosial dari berbagai pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukan jumlah mayoritas (*numerical majority*) akan tetapi mayoritas yang efektif (*effective majority*). Subjek opini publik adalah masalah baru yang kontroversial dimana unsur opini publik yaitu pernyataan yang kontroversial, tentang suatu hal yang bertentangan dan reaksi pertama atau gagasan baru.

Opini publik identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun dan kebebasan dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide dan pendapat.

Adapun ciri-ciri opini publik, diantaranya:

1. Terdapat isi, arah dan intensitas tentang opini publik, ciri tersebut berkaitan dengan opini publik terhadap tokoh politik partai dan pemimpin yang menduduki jabatan publik;

2. Kontroversi menandai opini publik, artinya sesuatu yang tidak disetujui oleh semua rakyat/masyarakat;
3. Opini publik mempunyai volume berdasarkan kenyataan bahwa kontroversi tersebut menyentuh semua orang yang merasakan konsekuensi langsung dan tidak langsung;
4. Opini publik tidak diketahui seberapa lama, akan tetapi umumnya opini publik yang menghasilkan kontroversi sering bertahan lebih lama.

Proses pembentukan opini publik terjadi atas beberapa tahapan, yaitu;

1. *Die Liftarigen Position*, pada tahapan ini, opini publik masih di dalam keadaan yang tidak teratur.
2. *Die Fleissigen Position*, pada tahapan ini opini telah mulai menuju ke arah pembicaraan yang lebih detail, pendapat mulai berkumpul ke arah tertentu dan jelas;
3. *Die Fleissigen Position*, pada tahapan ini opini berada pada tahapan pembicaraan atau diskusi yang sudah mantap tentang suatu pendapat dan sikap yang diyakini keberadaannya.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud;

- a. Sebagai media pembelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana cara memberikan pendapat atau saran melalui media terhadap suatu persoalan atau kejadian yang sedang menjadi topik pembicaraan (viral);
- b. Sebagai ruang untuk memberikan berpendapat sekaligus sebagai ruang berpartisipasi dalam mengasah kepedulian masyarakat terhadap kejadian/peristiwa yang lagi hangat dan menjadi topik pembicaraan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri yaitu dengan cara ikut berpartisipasi dengan menghubungi narasumber yang hadir secara langsung.

2. Tujuan;

Untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap topik yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat melalui media sosial (viral) sehingga informasi yang didapat akhirnya menjadi jelas fakta dan datanya dan bukan informasi hoak.

Sasaran

Sasaran yang telah dicapai dari terselenggaranya kegiatan ini adalah terkelolanya informasi dan opini publik yang sedang viral dan berkembang di media kepada masyarakat dengan baik sehingga masyarakat pada akhirnya mendapatkan informasi yang jelas dan akurat (bukan informasi hoak) sehingga opini yang berkembang dapat menjadi informasi berguna untuk masyarakat.

Waktu Pelaksanaan

12 (dua belas) bulan.

Tim Penyelenggara Kegiatan

Tim penyelenggara yang terbentuk untuk kelancaran dalam melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab;
Memiliki tugas sebagai penanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
2. Pemimpin Redaksi;
Memiliki tugas, menentukan dan memutuskan naskah siaran opini dan aspirasi yang akan disiarkan, bertanggung jawab terhadap isi siaran opini dan aspirasi dan bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi.
3. Admin Medsos;
Memiliki tugas, mengusulkan tema naskah opini dan aspirasi yang akan disiarkan, memperbaiki penulisan tema naskah siaran agar dapat mudah dimengerti, memastikan bahwa tema naskah siaran tidak menyangkut SARA, UJARAN KEBENCIAN atau apapun yang dapat meresahkan.
4. Moderator;
Memiliki tugas, menanggapi setiap informasi, opini dan aspirasi yang masuk melalui media sosial dengan baik, memberi tanggapan positif atas informasi, opini dan aspirasi yang masuk melalui media sosial, berpartisipasi aktif di media sosial.
5. Anggota Redaksi

Memiliki tugas, mencari opini dan aspirasi yang sedang berkembang di masyarakat melalui media sosial, lalu mengumpulkan, mengolah opini dan aspirasi, melalui media sosial dengan baik.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Pertama-tama aspirasi/opini yang sedang berkembang di masyarakat maupun media di kumpulkan oleh tim pelaksana kegiatan; selanjutnya
- b. Tim pelaksana akan memilah dan memilih aspirasi/opini mana yang kira-kira akan diangkat menjadi topik pembahasan, lalu
- c. Tim akan membuat rancangan materi topik pembahasan sesuai dengan aspirasi/opini yang telah dipilih;
- d. Selanjutnya materi tersebut di serahkan ke pihak ketiga untuk di buat materi siaran;
- e. Lalu materi siaran tersebut di publikasi melalui media yang telah dipilih.

Realisasi anggaran kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Aspirasi dan Opini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai	: Rp	48.300.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	101.700.000,-

Dengan realisasi keuangan sebesar:

- Belanja Pegawai	: Rp	48.000.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp	24.930.200,-
- Total Realisasi	: Rp	72.930.200,-

Target dan Hasil Kegiatan

Target dan hasil kegiatan yang ingin dicapai dari terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik adalah dengan terkelolanya informasi, aspirasi dan opini publik dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang baik pula di masyarakat.



- **Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah** dengan kegiatan :
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan kebutuhan data dan informasi statistik yang berkualitas, masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Maka dilaksanakan program pengembangan data/informasi/statistik daerah untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan efektif.

Ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data tidak saja menjadi rujukan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Seiring perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah semakin maju dan semakin berkembang, TIK telah menjadi kebutuhan pokok dari keseharian kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Dengan

perkembangan TIK saat ini memungkinkan semua bidang kehidupan manusia dapat semakin ringan dikerjakan seperti menggunakan komputer atau smartphone untuk belajar, bermain game dan mencari informasi di internet, serta berkomunikasi melalui jaringan networking dimanapun dan kapanpun pengguna memiliki kesempatan.

Berdasarkan hal diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna melaksanakan Survei Pemanfaatan TIK.

Maksud dan tujuan

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya Survey Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah: untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data yang secara sistematis dan efisien. Sedangkan tujuan adalah untuk menyediakan data TIK dan memberikan gambaran mengenai penggunaan TIK di Kabupaten Natuna.

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari Survei Pemanfaatan TIK adalah agar tersedianya data dan informasi yang menjadi salah satu acuan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

Lingkup pelaksanaan kegiatan

1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi kepada Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Media, dan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Melakukan Survei Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
4. Melakukan pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan;
5. Melakukan pembentukan tim penyusunan data statistik sektoral;
6. Melakukan pengumpulan, pengklasifikasian, penyusunan, pengolahan, pendokumentasian, publikasian data melalui web dan pencetakan buku statistik.

Metode Pelaksanaan

1. *Swakelola*

Dimana dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna.

2. *Menggunakan Penyedia Barang/Jasa*

Untuk paket belanja cetak, makan minum rapat yang pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan pihak penyedia jasa sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di www.sirup.lkpp.go.id.

Waktu dan tempat pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah selama 10 (Sepuluh) bulan. Survey dilakukan kepada rumah tangga dan individu berusia 9-65 tahun. Wilayah survei ini berdasarkan sampel survey sosial ekonomi nasional (Susenas 2018) adalah 45 blok sensus dan 450 rumah tangga (1 blok terdiri 10 rumah tangga) dan tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Natuna.

Realisasi Fisik dan Keuangan

Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 250.000.000,- Realisasi Keuangan sebesar Rp. 221.174.300,- dan Persentase Realisasi Keuangan 88.47% dengan Sisa Anggaran sebesar Rp. 28.825.700,-

Evaluasi terhadap pelaksanaan

a. Keberhasilan

Hasil dari kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah adalah buku Survei Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Natuna yang berisikan data: 1. kepemilikan komputer, laptop, smartphone, tablet, dan handphone, 2. Lokasi penggunaan TIK, 3. Aktifitas penggunaan alat TIK.

b. Hambatan/Kendala

Beberapa hambatan/kendala dalam pelaksanaan Survei Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah:

- Hasil survei ini belum bisa menggambarkan penggunaan TIK menurut kecamatan
 - Data yang dihasilkan masih berupa persentase
 - Kurangnya SDM statistik
- c. Solusi Pemecah Masalah
- Mengikuti pelatihan keterampilan maupun kegiatan sosialisasi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan terutama di bidang statistik. Buku Pemanfaatan TIK sebagai data dan informasi dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk menentukan strategi pembangunan dan pemanfaatan bidang lainnya seperti dibidang ilmu pengetahuan dan penelitian yang terkait dengan bidang TIK.



B. PROGRAM/KEGIATAN DAN TARGET KINERJA TAHUN 2019

Didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2019 terdapat 7 (Tujuh) Program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan, karena keterbatasan anggaran yang terakomodir pada tahun 2018 hanya 8 (Delapan) Program dan 21 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- (1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, yang terdiri dari 11 kegiatan rutinitas antara lain:
 - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - (3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - (4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - (7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
 - (8) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - (9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- (10) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- (11) Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
- (2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, yang terdiri dari 2 kegiatan rutinitas antara lain:
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (3) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, yang terdiri dari 1 kegiatan rutinitas antara lain:
1. Kursus dan Peningkatan keterampilan Aparatur
- (4) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, yang terdiri dari 1 kegiatan rutinitas antara lain:
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- (5) **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**, yang terdiri dari 3 kegiatan antara lain:
1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
 2. Implementasi e-Government
 3. Pembangunan Infrastruktur e-Government
- (6) **Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi**, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:
1. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
- (7) **Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:
1. Pengelolaan aspirasi dan opini publik
- (8) **Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah**, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

Adapun target kinerja program/kegiatan tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 2** laporan tahunan ini.

C. HASIL CAPAIAN PROGRAM RPJMD 2016-2021 TAHUN 2017 & 2018

Hasil capaian program RPJMD 2016-2021 melalui pelaksana RKPD tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 4.2.

D. HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 & 2018

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Hasil capaian indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 4.3.

E. PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2017 dan masih berlaku s/d tahun ini adalah:

- a. Nota Kesepahaman Bersama antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, Nomor: TEL.302/HK 800/R1W-1/100000/2017 dan Nomor : 180/HK-NKB/25/2017 tentang Pengembangan dan Implementasi Natuna Smart Islands yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017.
- b. Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika Nomor : 180/HK-PPK/41/2017 dan Nomor : 102/KOMINFO/BPPPTI.31/HK.03.02/12/2017 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau kepada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2017.

Pada tahun 2018, juga dilaksanakan perjanjian kerjasama antara lain:

- Nota Kesepahaman Bersama antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Super Sistem Ultima dengan Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor:



147/MOU-NTN/SSU/IV/2018 dan Nomor: 180/HK-NKB/7/2018 tentang Dukungan Pembangunan Natuna Smart Islands yang dilaksanakan tanggal 09 April 2018.

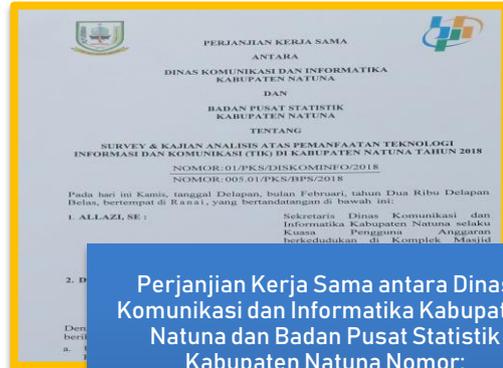
Nota Kesepahaman Bersama ini mempunyai ruang lingkup:

1. Pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka mendukung Natuna Smart Islands;
2. Akses telekomunikasi bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Natuna dalam kerangka mendukung Natuna Smart Islands;
3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang Natuna Smart Islands;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi;
5. Kerjasama lainnya yang akan diatur kemudian.

Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan 2 (dua) instansi vertikal dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2018 yaitu kegiatan Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik dan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.



Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang acara KOPI PAGI (Kancah Opini Pagi Hari) yang dilaksanakan tanggal 13 Februari 2018.



Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna Nomor: 01/PKS/DISKOMINFO/2018 dan Nomor: 005.01/PKS/BPS/2018 tentang Survey dan Kajian atas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Natuna Tahun 2018 yang dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018.

Tabel 4.2.

**HASIL CAPAIAN PROGRAM RPJMD2016-2021
MELALUI PELAKSANA RKPd TAHUN 2017 & 2018**

No.	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Target RPJMD Kabupaten pada RKPd Kabupaten Tahun ke										Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun ke				Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Hasil Pelaksanaan RKPd Tahun ke				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (12)+(13)		Rasio Capaian Akhir (%) (22)/(6)	
						1		2		3		4		5		1		2		1		2		K	Rp.	K	Rp.
						2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2017		2018					
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)											
					K	Rp. (Ribuan)	K	Rp. (Ribuan)	K	Rp. (Ribuan)	K	Rp. (Ribuan)	K	Rp. (Ribuan)	K	Rp. (Ribuan)	K	Rp. (Ribuan)	K	Rp. (Ribuan)	K	Rp. (Ribuan)	K	Rp. (Ribuan)			
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	URUSAN WAJIB																									
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																										
1.16.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	60	6,809,292	12	1,692,292	12	1,168,000	12	1,235,000	12	1,321,000	12	1,393,000	12	1,632,496,950	12	1,985,558,011	100	96.47	100	170	24	3,618,053,81	40	53.13
1.16.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	75	2,461,000	65	458,000	65	419,000	70	549,000	70	375,000	75	660,000	30.25	5,176,300	61.85	47,152,300	46.54	11.17	95.15	11.25	61.85	98,328,600	82.47	4.00
1.16.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	85%	95	1,325,000	85	200,000	90	450,000	90	-	95	-	95	675,000	-	-	-	85	-	90	-	100	-	100	-	-
1.16.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	0%	75	2,110,000	55	150,000	60	250,000	65	560,000	70	570,000	75	580,000	24	4,147,400	58.34	77,719,900	43.64	27.65	97.23	31.09	58.34	19,197,300	77.79	5.65
1.16.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	CC/52,58	A/80	315,000	B/68	75,000	B/70	50,000	BB/74	60,000	BB/76	60,000	A/80	70,000	0	9,985,400	70.10	63,035,500	0	26.65	87.63	126.07	70.10	83,020,900	87.63	26.36
1.16.15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah website perangkat daerah	4 Dok, 1 Titik, 16 Website	6 Dok, 40 titik, 40 website, 82 aplikasi	18,625,000	4 Dok, 3 titik, 19 website, 5 aplikasi	1,375,000	6 Dok, 5 titik, 20 website, 12 aplikasi	2,750,000	6 Dok, 6 titik, 24 website, 25 aplikasi	2,500,000	6 Dok, 25 titik, 32 website, 52 aplikasi	5,900,000	6 Dok, 40 titik, 40 website, 82 aplikasi	6,100,000	4 Dok, 1 titik, 8 website	700,391,600	4 Dok, 3 titik, 29 website	775,622,723	50.94	28.20	4 Dok, 3 Titik, 29 Website	1476,014,323	7.92			
		persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	1 PD	1 PD	350,000	1	-	1	350,000	1	-	1	-	1	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100	100	100	
1.16.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	meningkatkan kapasitas SDM di bidang komunikasi dan informatika	6 kelompok, 40 orang	17	3,100,000	2	200,000	3	350,000	4	700,000	1	800,000	1	1,050,000	3	95,299,400	14	37,421,700	150	67.65	466.7	10.69	17	172,720,800	100	5.57
		sistem informasi manajemen penda	28 sistem	110	1,500,000	33	-	40	250,000	50	400,000	80	400,000	110	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	jumlah surat kabar nasional/lokal	54 jenis	56	2,000,000	54	-	55	500,000	55	500,000	56	500,000	56	500,000	59	-	59	72,930,200	109.3	-	107.3	14.59	59	72,930,200	105.4	3.65
		meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah	0 media	2		2		2		2		2		2													
1.20.	STATISTIK																										
1.20.15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	buku "kabupaten dalam angka" data dan informasi statistik daerah	100 exp	100	1,000,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	1	10,577,600	1	221,014,300	100	55.29	100	110.59	2	331,751,900	40	33.18
TOTAL																											
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)															
												Predikat Kinerja															
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian			: Kegiatan dilaksanakan sesuai time schedule, dana/anggaran yang tersedia																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			: Kejelasan anggaran kegiatan																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya			:																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RPJM berikutnya			:																								

Tabel 4.3.

**HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017 & 2018**

NO.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2016	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	TARGET					REALISASI		CAPAIAN (%)		CAPAIAN TERHADAP RPJMD (%)	KETERANGAN (TERCAPAI/ BELUM TERCAPAI)
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ASPEK PELAYANAN UMUM															
II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar															
2.10. Komunikasi dan Informatika															
2.10.1	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	57	67	59	61	63	65	67	68	79	115.25	129.51	193.30	A danya peningkatan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi maupun bantuan BAKTI Kominfo
2.10.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk		6	0	0	0	0	0	0	3	1	300	100	100	
2.10.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	jenis	54	56	54	55	55	56	56	59	59	109.26	107.27	105.36	
2.10.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	jenis	9	10	9	9	10	10	10	9	2	100	22.22	20.00	RRI & Radio STAI
2.10.5	Web site perangkat daerah	web	16	40	18	20	24	32	40	18	29	100	145	72.50	
2.10.6	Sistem Informasi Manajemen Pemda	sistem	28	110	33	40	50	80	110	75	65	227.27	162.50	59.09	
2.10.7	Pameran/Expo	kali	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0.00	
2.10.8	Sistem informasi Pelayanan Perijinan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	
2.14. Statistik															
2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	
2.14.3	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	
2.15. Persandian															
2.15.1	PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	PD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	
ASPEK DAYA SAING DAERAH															
II. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur															
5. Komunikasi dan Informatika															
5.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	78.68	94.03	81.75	84.82	87.89	90.96	94.03	-	58.3	-	68.73	62	Hasil dari survey pemanfaatan TIK, kerjasama Diskominfo dengan BPS

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS

BAB V

Hasil Pelaksanaan Kegiatan **RUTINITAS SKPD BERDASARKAN TUPOKSI**

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini sudah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak keberadaannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memiliki cita-cita menjadikan pemerintah yang *Smart* dengan mewujudkan mulai dengan *Smart Office*, *Smart City* dan *Smart Islands*, oleh karena itu saat ini Kabupaten Natuna ini sedang melaksanakan proses transformasi menuju e-Government yang lebih baik. Untuk mendukung e-Government yang baik Pemerintah Kabupaten Natuna mau tidak mau harus memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian melalui tahapan demi tahapan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk mewujudkan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah.

Secara bertahap sudah mulai bekerja baik melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun diluar program dan kegiatan. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

Salah satu aktivitas administrasi dinas adalah kegiatan surat menyurat, pada tahun 2018 terdapat 562 surat masuk dan 249 surat keluar, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 5.1. dan tabel 5.2. di bawah ini. Untuk proses administrasi kendala yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan pegawai mengenai tata naskah dinas sehingga perlu pelatihan mengenai surat menyurat dan kearsipan. Selain itu, terbatasnya tempat penyimpanan arsip kantor dan kurangnya koordinasi serta kerjasama antara pegawai yang menangani tata persuratan. Pada tahun 2018 ada 6 (enam) orang PNS yang mengikuti diklat/kursus dapat dilihat pada *Tabel 5.3*. Pengurusan kenaikan gaji berkala

maupun kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil juga menjadi salah satu tugas di sub bagian umum dan kepegawaian. Ada 5 (lima) orang PNS yang naik pangkat golongan, 3 (tiga) orang diantaranya di periode April 2018 dan 2 (dua) orang lainnya di periode Oktober 2018 (*Tabel 5.4.*)

Tabel 5.1.
SURAT MASUK/SURAT KELUAR
TAHUN 2018

SURAT MASUK	SURAT KELUAR
562 Surat	249 Surat

Tabel 5.2.
SK MASUK/SK KELUAR
TAHUN 2018

SK MASUK	SK KELUAR
22 SK	32 SK

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

Proses perencanaan dimulai dengan penyusunan rencana kerja (Renja) 2019 berdasarkan usulan dan koordinasi dari bidang, baik anggaran yang bersumber dari APBD, APBD Propinsi maupun APBN berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang dijabarkan pada detail kegiatan.

Pada tanggal 12 Januari 2018 dilakukan Interview Kinerja Perangkat Daerah oleh



KemenpanRB dengan tujuan penyempurnaan laporan untuk meningkatkan penilaian dari hasil penyusunan LAKIP. Namun terlepas penilaian yang ada, program kerja seharusnya mengacu padaupaya mendisiplinkan penggunaan

anggaran agar lebih tepat sasaran serta pemahaman terhadap program kerja harus

utuh dan terarah. Hal ini menjadi penting mengingat salah satu syarat Pemerintah Daerah mendapatkan dukungan program kegiatan dari pemerintah pusat adalah hasil pengelolaan seluruh program kerja harus bernilai baik. Penyusunan rencana dan realisasi program kerja harus selalu bersinergi dan saling mendukung, berbagai dokumen penyelenggaraan pembangunan harus dapat dikemas secara lebih realistis dan terukur agar lebih memudahkan proses audit dan evaluasi.

Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna dianggarkan dalam DPA maupun DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dengan jumlah anggaran belanja tahun 2018 pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) murni sebesar Rp 10.281.401.106,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 2.081.998.006,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 8.199.403.100,- , setelah perubahan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp 6.946.072.169,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 2.322.835.069,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 4.623.237.100,- yang terealisasi sebesar Rp 5.591.048.684,- atau 80,49%. Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun ini sebesar Rp 1.355.023.485,- terdiri dari sisa anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 12.401.019,-, dan sisa belanja langsung sebesar Rp 1.342.622.466,-. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan dana yang tersedia di kas daerah sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda.

TABEL 5.3.
DAFTAR PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT/KURSUS TAHUN 2018

NO.	NAMA	NAMA DIKLAT	TEMPAT	TANGGAL DIKLAT	PELAKSANA
1	MARIA YULIASTANTI, SE	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara SKPD	Hotel Mutiara Yogyakarta	18-20 April 2018	ETSAGAMA Training Centre Indonesia
2	RENI HARYANTI	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara SKPD	Hotel Mutiara Yogyakarta	18-20 April 2018	ETSAGAMA Training Centre Indonesia
3	ALLAZI, SE	Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018	Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta	14 Mei 2018	Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
4	WAN SUHARDI, SE	Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018	Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta	14 Mei 2018	Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
5	RAJA ABRIZAL	Diklat Training dan Sertifikasi MTCNA dan MTCRE	Batam	27-29 Juli 2018	Rainusa Training Centre Batam

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

TABEL 5.4.
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG NAIK PANGKAT GOLONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL		PERIODE
				LAMA	BARU	
1	MARIA YULIASTANTI, SE	19750111 200502 2 004	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Penata Muda Tk. I/ III-b	Penata/III-c	1 April 2018
2	CIYINLIE	19740419 200604 2 018	Verifikator Keuangan	Pengatur / II-c	Pengatur Tk. I/II-d	1 April 2018
3	SLAMET RIYANTO	19820226 201001 1 003	Jurnalis	Pengatur Muda Tk. I/ II-b	Pengatur/II-c	1 April 2018
4	HERU SETIAWAN, S.IP	19780214 200701 1 010	Kasi. Layanan e-Government	Penata Muda Tk. I/ III-b	Penata/III-c	1 Oktober 2018
5	RAJA ABRIZAL	19781005 200604 1 016	Operator Komunikasi	Pengatur / II-c	Pengatur Tk. I/II-d	1 Oktober 2018

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

Sedangkan di luar penggunaan APBD, dilakukan dengan mengajukan usulan Program/Kegiatan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Cq. Badan Akselerasi Telekomunikasi Indonesia (BAKTI), dan meminta peran aktif stakeholder (khususnya penyelenggara telekomunikasi) untuk melakukan pembangunan infrastruktur jaringan dan akses telekomunikasi di Kabupaten Natuna.

Sejumlah bantuan program/kegiatan telah dikururkan ke Kabupaten Natuna melalui Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya yang berasal dari :

▪ **Program KPU/USO**

Telah beroperasinya backbone fiber optik (PALAPA RING BARAT)

Bantuan tower bts dan internet untuk publik (wifi publik), sekolah (SD,SMP, SMA), Kelurahan/Desa, Puskesmas.

▪ **Penyedia jasa telekomunikasi**

Pembangunan jaringan fiber optik di kota Ranai (Telkom),

Pembangunan dan peningkatan layanan tower bts (Telkomsel dan Smartfren)

Sebagai gambaran apa yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 tidak terlepas pula dari kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2017 sebelumnya.

▪ **KEIKUTSERTAAN PADA PROGRAM PEMERINGKATAN**

1. PROGRAM GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY

Dasar :

1. Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor B.48/KOMINFO/DJAI/AI.01.05/01/2018 Tanggal 25 Januari 2018 Perihal Undangan Mengikuti Penilaian (Assesment) Dalam Rangka Program Gerakan Menuju 100 Smart City
2. Surat Persetujuan untuk mengikuti Program Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Natuna, di Ranai 16 Februari 2018.
3. Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor B.217/KOMINFO/DJAI/AI.01.05/04/2018 Tanggal 9 April 2018, Perihal Penyampai Hasil Seleksi Assesment Gerakan Menuju 100 Smart City.

Bentuk Kegiatan :

1. Sebanyak 154 daerah se-Indonesia di undang untuk mengikuti penilaian (assesment) program Gerakan Menuju 100 Smart City yang diselenggarakan oleh Deputi Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
2. OPD ditugaskan untuk mengisi kuisisioner berikut melampirkan bahan-bahan pendukung pada aplikasi yang telah diberikan (online).
=> analisis kesiapan daerah (struktur kelembagaan daerah, struktur SDM, infrastruktur dan aplikasi); perencanaan dan penganggaran; interoperabilitas; analisis gap; analisis visi pembangunan daerah;
3. Setelah mendaftar dan mengisi kuisisioner selanjutnya daerah di undang untuk melakukan sesi wawancara kepada para penguji atas hasil kuisisioner dan bahan pendukung yang telah diupload. (Penguji berasal dari Kementerian Keuangan, Badan Riset dan Teknologi, Kementerian Kominfo.
Untuk sesi wawancara yang diundang adalah Diskominfo dan BP3D
4. Kegiatan berlangsung dari bulan Januari s/d April 2018

Hasil Kegiatan :

Terpilih 24 daerah yang akan mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City, namun Kabupaten Natuna belum terpilih.

Analisa Belum Terpilih diakibatkan :

1. Komitmen Smart City yang diinginkan belum tercantum dalam RPJMD sehingga tidak diketahui secara pasti komitmen pimpinan tinggi daerah dalam pelaksanaan Smart City, mengingat pelaksanaan Smart City dilakukan secara bertahan dan kontinu.
2. Dari point 2, berdampak pada penganggaran untuk kegiatan Smart City yang belum tampak di RPJMD maupun Renstra Dinas
3. Belum terbangunnya infrastruktur (jaringan) pendukung Smart City.

Masukan :

1. Walaupun daerah Kabupaten Natuna belum terpilih untuk didampingi secara program melaksanakan Smart City, namun komitmen untuk melaksanakan Smart City di Kabupaten Natuna dapat terus dilakukan dengan cara mandiri.

Pihak daerah dapat langsung didampingi para konsultan, ahli dan pihak kementerian di bidang pembangunan Smart City.

2. Kabupaten Natuna dapat mengikuti assesment pada tahun berikutnya.

2. PROGRAM EVALUASI SPBE

▪ SPBE I



Tujuan

Untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta dan Konsultasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.

Dasar Pelaksanaan

Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : B/41/S.KT.03/2018 Tanggal 19 Februari 2018 hal Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat Penyelenggaraan kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada tanggal 28 Maret 2018.

Hasil Kegiatan

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Tujuan Evaluasi SPBE
 - a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.
 - c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Tahapan Evaluasi SPBE
 - a. Perencanaan
Mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi.
 - b. Pelaksanaan
Melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan.
 - c. Pelaporan
Menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.
4. Struktur penilaian SPBE terdiri atas :
 - a. 3 Domain yaitu Kebijakan Internal , Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE.
 - b. 7 Aspek yaitu Tata Kelola, Layanan, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik.
 - c. 35 Indikator :
 - Tata Kelola terdapat 7 Indikator;
 - Layanan terdapat 10 Indikator;
 - Kelembagaan terdapat 2 Indikator;
 - Strategi dan Perencanaan terdapat 2 Indikator;
 - Teknologi Informasi dan Komunikasi terdapat 3 Indikator;
 - Administrasi Pemerintahan terdapat 7 Indikator;
 - Pelayanan Publik terdapat 4 Indikator;
 -

5. Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis yaitu :
 - a. Informasi : Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
 - b. Interaksi : Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
 - c. Transaksi : Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
 - d. Kolaborasi: Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
 - e. Optimalisasi: Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.
6. Pelaporan Evaluasi Mandiri disampaikan secara daring (online) paling lambat tanggal 18 Mei 2018.

▪ SPBE II

Tujuan

Untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.

Dasar Pelaksanaan

Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : B/234/KT.03/2018 Tanggal 25 April 2018 hal perubahan jadwal evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2018.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat Penyelenggaraan kegiatan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Hotel Grand Kemang, Jl. Kemang Raya RT. 14/RW.1, Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730 pada tanggal 6 Agustus 2018.

Hasil Kegiatan

1. Telah mengikuti Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Evaluator 2 orang :
2. Adapun Kegiatan Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi :
 - a. Tanya jawab yang berkenaan dengan indikator dan data pendukungnya diantaranya sebagai berikut :

1. Indikator 2 Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Laporan awal masih pada Level 0 dikarenakan ketidaktahuan maksud dari indikator ini. Dari penjelasan evaluator diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna sebenarnya memiliki data dukung untuk menaikkan level indikator ini, yakni Perbub tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan data dukung tambahan Aplikasi e-planning, e- bugdeting, e- perbendaharaan serta e-SAKIP sehingga Indikator 2 naik menjadi level 5.
2. Indikator 4 Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
Penambahan data dukung baru yakni RPJMD 2016 - 2021 sebagai data dukung tambahan.
3. Indikator 11 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Data dukung tambahan yang perlu dilampirkan adalah bukti evaluasi kegiatan berupa surat undangan evaluasi atau berita acara evaluasi.
4. Indikator 12 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
Di awal evaluasi indikator ini tidak di ceklist sehingga diperbaiki menjadi level 5 dan bukti dukung sudah lengkap.
5. Indikator 17 Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah
Perlu adanya data dukung tambahan.
6. Indikator 19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Data Dukung indikator ini sama dengan data pada indikator 2 sehingga dari Level 0 Menjadi Level 5.
7. Indikator 23 Integrasi Sistem Aplikasi
Pada indikator ini perlu adanya tambahan data dukung, berupa upgrade aplikasi atau penambahan fitur pada aplikasi.
8. Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan, Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran dan Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan
Perlu adanya tambahan data pendukung berupa up grade aplikasi atau penambahan fitur pada aplikasi.
9. Indikator 35 Layanan Pelayanan Instansi Pemerintah
Pemeringkatan pada Indikator 35 adalah pemeringkatan terhadap aplikasi layanan publik yang di buat atau dibangun sendiri oleh

Pemerintah Daerah sendiri bukan aplikasi yang digunakan dari kementerian atau Pemerintah Pusat.

Pelaporan

Apabila ada perbaikan atas laporan yang sudah dikirimkan maka dapat dikirimkan melalui e-mail ade@staff.gunadarma.ac.id atau singgih@staff.gunadarma.ac.id. Perbaikan dapat dikirimkan paling lambat hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018.

■ **PROGRAM PeGI (PEMERINGKATAN e-GOVERNMENT INDONESIA) UNTUK TINGKAT PROVINSI KEPRI**

Dasar :

Surat Inspektur Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksana

1. Tim Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau (Pemeriksa)
2. Bidang Penyelenggaraan E-Government (Terperiksa-Mewakili Diskominfo)

Tempat/Waktu Pelaksanaan

Ranai. Oktober 2018

Bentuk Kegiatan

1. Tim Inspektorat mewakili Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring atas kegiatan PeGI di Kabupaten Natuna.
2. Sejumlah dokumen pendukung terkait kegiatan PeGI, diantaranya : Renstra, Struktur Organisasi – Tupoksi, Dokumen yang berkenaan dengan infrastruktur jaringan e-Government di Natuna.

Hasil

Belum ada hasil yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa / Diskominfo Provinsi Kepri.

■ **KEIKUTSERTAAN DALAM RENCANA AKSI DAERAH**

1. REN-AKSI KPK

Dasar :

Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI nomor B/523/KSP.10-16/01/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Monitoring dan Evaluasi Realisasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Periode Sampai Dengan 31 Desember 2017.



Tempat/Waktu Pelaksanaan

Batam, 5 – 9 Februari 2018

Bentuk Kegiatan

Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan monitoring berupa pendalaman materi atas dokumen Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (KPK) kepada sejumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang telah diserahkan ke KPK.

=> OPD : Inspektorat, Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembagnan Daerah, BPKPAD, PMPTSP, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Unit Layanan Pengadaan.

1. RENAksi Diskominfo;

-  Data Website
-  Pembentukan Tim Implementasi E-Government Kabupaten Natuna
-  Penerapan aplikasi e-office (siMaya)
-  Reviuw Dokumen Perencanaan
-  Pembangunan Jaringan Infrastruktur E-Government
-  Peraturan

Tindak Lanjut

Mengumpulkan bahan/dokumen sesuai dengan jadwal RENAksi per Triwulan.

2. RENCANA AKSI DAERAH - KONFLIK SOSIAL

Dasar

Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Daerah, Nomor 300/BAKESBANGPOLDA/11/47/2018, Tanggal 21 Februari 2018, Perihal Permintaan Data Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018.

Tempat/Waktu Pelaksanaan

Ranai, Juli – Desember 2018

Bentuk Kegiatan

Menyiapkan bahan/dokumen dukung berkenaan dengan keadaan/situasi konflik sosial.

■ PELAKSANAAN TUPOKSI DALAM MEMPRAKARSAI/MEMFASILITASI KEGIATAN

■ KUNJUNGAN KERJA DIREKTUR UTAMA BAKTI

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Anang Latif, pada tanggal 6 Maret 2018 mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna dalam rangka :

- Uji Coba Internet Cepat dengan menggunakan Backbone Palapa Ring dan dukungan koneksi PT Moratel di Gedung NOC – Bandaryah
- Kunjungan ke (BHM) Beach Main Hole di Penarik,
- Sosialisasi Operational Jaringan Palapa Ring Barat dan Pemanfaatannya oleh Dirut BAKTI dan Dinas Kominfo bersama Para Nelayan di Kantor Camat Bunguran Selatan.



■ KUNJUNGAN KERJA MENTERI KOMINFO RI

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara dengan didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo, Direktur Utama BAKTI Anang Latif,



pada tanggal 26 Maret 2018 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna. Pada kunjungan kali ini Menteri Kominfo melakukan :

Peninjauan kesiapan operasional dan melakukan uji coba layanan internet dengan menggunakan

Backbone Palapa Ring Barat Natuna. Tempat di NOC (Network Operation Center)
Jl. H. Adam Malik – Bandarsyah, Ranai.

▪ **KUNJUNGAN KERJA TIM MENGGKOPOLHUMAN**

Sejumlah Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI pada tanggal 5 Juni 2018 melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Natuna. Keker ini dilakukan dalam rangka:

- Tindak lanjut dari Surat Bupati Natuna kepada Panglima TNI RI Nomor 555/KOMINFO-EGOV/IV/2018/83 tanggal 16 April 2018 perihal Permohonan Peningkatan Telekomunikasi di Kecamatan Pulau Laut, laut Natuna Utara.
- Sehubungan dengan point di atas kemudian dilaksanakan rapat koordinasi bersama pihak Pemerintah Kabupaten Natuna yang dipimpin oleh Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprati, dengan peserta Balmon Batam, Mitratel, Camat Bunguran Tengah, Perwakilan Kecamatan Midai, Telkomsel, Polres, Asisten, Dan Lanud, Dandim, Palaksa Lanal, Satrad 212, Bakesbang, Telkom, Camat Subi, BP3D, Humas, Camat Pulau Tiga, Perwakilan Kecamatan Serasan Timur, Perwakilan Kecamatan Pulau Tiga Barat, Perwakilan Kecamatan Bunguran Timur, PLN Natuna, Kominfo.

Hasil pertemuan;

- 1) Meminta pihak Mengkopolhukam mengkoordinir ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI agar mempercepat penggunaan Fo Palapa Ring Barat oleh Telkom dan Telkomsel
- 2) Meminta Pihak Telkom dan Telkomsel segera mengatasi masalah kapasitas voice dan data untuk Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Serasan dan Pulau Midai
- 3) Meminta kepada Telkomsel untuk menambah layanan data 3G/4G di beberapa site dalam kota Ranai sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

▪ **SERTIFIKASI SKKNI**

Pendampingan Kegiatan Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian (BBPSDMP) Kominfo Medan - 9 & 10 Agustus 2018. Dilaksanakan di Laboratorium. Komputer SMA Negeri 1 Kec. Bunguran Timur, Ranai - Kab. Natuna.



Secara umum dapat digambarkan pelaksanaan rutinitas non kegiatan yang dilaksanakan dan menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

Sektor Telekomunikasi

Walaupun sektor telekomunikasi bukan masuk dalam urusan yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika namun sampai kondisi saat ini untuk urusan telekomunikasi di daerah, menjadi salah satu urusan yang ditangani oleh Bidang Penyelenggaraan e-Government.

Tabel 5.5

LAYANAN TELEKOMUNIKASI REGULER

Layanan	Jumlah Site	
	2017	2018
Telkomsel	36	38
Indosat	11	11
XL	6	6
Smartfren	0	1
Sub Total	53	56

1. Untuk tahun 2018 penambahan tower bts ada 3 yaitu 2 (dua) telkomsel yang terletak di NOC PRB dan Site Selat Lampa dan 1 (satu) yaitu Smartfren. Smartfren

- direncanakan akan membangun 14 site tower bts lagi yang saat ini dalam proses pekerjaan dan perijinan.
2. Kecamatan Bunguran Timur, hampir semua tower bts sudah ditingkatkan menjadi 4G, kecuali di kelurahan Bandarsyah masih terdapat 1 site 2G, dan 2 site 3G dan Batu Gajah 2G. (Telkomsel), sedangkan operator lainnya masih 2G.
 3. Daerah lainnya yang sudah 4G yaitu Desa Harapan Jaya, Desa Sabang Mawang Barat, Desa Tanjung, Kelurahan Sedanau, Desa Kelarik, Desa Gunung Putri.
 4. Kondisi sinyal yang agak bermasalah masih terjadi di Pulau Laut, Subi dan Serasan Timur, karena layanan masih 2G. Sedangkan daerah-daerah lainnya ada yang 2G dan 3G.

Kabel Fiber Optik (Fo)

Di kawasan perkotaan di Kabupaten Natuna (Ranai) sudah terbangun jaringan kabel fiber optik (fo) atau sering disebut serat optik. Dengan terbangunnya jaringan fo, kondisi telekomunikasi yang selama ini cukup bermasalah (sinyal yang lelet dan kekurangan bandwidth) dapat teratasi dengan lebih baik.

Selain fo Palapa Ring Barat, sebagai bankbone utama, pihak Telkom saat ini sudah mulai memanfaatkan fo PRB untuk pengoperasian fo nya kepada konsumen.

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah

- Koordinasi dan komunikasi dengan para penyelenggara telekomunikasi berkaitan dengan layanan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Natuna, yang berupa; penyampaian usulan penambahan dan peningkatan sinyal tower bts, menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan untuk dilakukan perbaikan.

Persandian

Untuk aktivitas persandian belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan perangkat persandian yang diserahkan oleh Bagian Humas kepada Diskominfo (Bidang E-Gov) sebagai pengelola, dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi. Aktivitas persandian, dilakukan hanya mempergunakan email sanapati.

Adapun mekanisme yang berjalan adalah ketika petugas sandi menerima email/surat/dokumen, maka yang bersangkutan meneruskan surat/dokumen tersebut kepada pihak yang dituju, (Bupati Natuna, Sekretaris Daerah) selanjutnya diserahkan melalui bagian umum sebagai bagian yang mengurus tata naskah dinas dilingkungan sekretariat daerah.

Tabel 5.6
DATA SANAPATI

Kabupaten	Provinsi	Total
350 dokumen	42 dokumen	392

BANTUAN PROGRAM

Atas usulan bantuan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Natuna (Diskominfo) tersebut diatas, mendapat respon/tanggapan yang cukup positif khususnya dari pemerintah pusat dan pihak swasta. Hal ini ditandai dengan dikucurkannya bantuan program/kegiatan di Kabupaten Natuna yaitu :

1. **Dari BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Tabel 5.7.
BANTUAN PROGRAM TOWER BTS

Uraian	Nama Program	Jumlah s/d	
		2017	2018
Program KPU/USO	Telinfo Tuntas	14	14
	Perbatasan	1	7
	TOTAL	15	21

Pada tahun ini dilaksanakan revitalisasi atas tower bts uso telinfo tuntas. Dari 14 tower bts telinfo tuntas: 12 tower bts dilakukan revitalisasi (diperbaiki kerusakannya) dan satu diantaranya yaitu tower bts di Setengar di pindah lokasikan ke teluk depeh dikarenakan di Setengar kondisi sinyal telekomunikasi sudah sangat baik dengan adanya tower bts di areal/kawasan Marinir/AD dan 1 tower bts di Teluk Buton menjadi tower merah putih. Sisa satu tower bts lagi di Harapan Baru (Serasan Timur) yang selanjutnya akan menjadi prioritas mengingat adanya persepsi yang berbeda antara tim survey yang turun ke lokasi dengan tim diskominfo. Kondis tower bts tersebut dalam kondisi rusak, dan masyarakat di sekitarnya khususnya yang berada di Air Nusa, Arum Ayam masih kesulitan untuk mendapatkan sinyal telekomunikasi. Tower bts program perbatasan, layanan sinyal masih G, dan beberapa uji coba ditemui kondisi harga layanan (telepon) lebih tinggi tarifnya daripada reguler.

2. **Wifi Publik**

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BAKTI, mengucurkan sebanyak 19 titik lokasi Wifi Publik di Kabupaten Natuna. Ke-19 lokasi tersebut terdiri atas ;

- 8 lokasi untuk Pemkab. Natuna (dikelola Diskominfo)
- 1 lokasi untuk Lanal
- 1 lokasi untuk Batalyon Komposit – Sepempang
- 1 lokasi untuk Satrad
- 8 lokasi untuk Lanud

Untuk wifi publik yang diperbantukan ke Pemkab Natuna berlokasi di:

1. Taman Pantai Kencana Jalan Soekarno Hatta
2. Gedung TIC Laman Kibang, JL. DKW Mohd Benteng
3. Halaman Kantor Bupati
4. Kawasan Pelabuhan Tanjung Payung, Jalan Pelantar Penagi
5. Halaman Kantor Perizinan
6. Kawasan Bandara Ranai
7. Arena Permainan Rakyat Jl. H. Adam Malik
8. Taman Baca Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Natuna juga mendapat bantuan dari Konsorsium PT. Palapa Ring Barat sebagai CSR (*corporate social responsibility*). Dari hasil survey direncanakan akan dipasang di 6 titik untuk ruang publik yaitu;

1. Kantor Lurah Bandaryah (on)
2. Kantor DPRD (on)
3. Kantor Desa Sepempang (on)
4. Kantor Bupati
5. Bandara
6. Pantai Kencana

3. **Akses Internet**

Kabupaten Natuna pada Tahun 2018 kembali mendapat bantuan akses internet untuk lokasi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Kelurahan dan Puskesmas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Cq BAKTI.

Sebelumnya Kabupaten Natuna pada Tahun 2015 pernah mendapat bantuan akses internet di 5 (lima) sekolah dasar dan 1 (satu) desa.

Disamping BAKTI, bantuan akses internet untuk sekolah juga diterima dari program CSR Konsorsium Palapa Ring Barat (PRB) yaitu untuk Sekolah SMA 2 Bunguran Timur dan SMP 2 Bunguran Timur.

Tabel 5.8.
AKSES INTERNET

Lokasi	Jumlah Titik	Keterangan
Sekolah Dasar	9	(7 Vsat, 2 Fo)
Sekolah Menengah Pertama	8	(6 Vsat, 2 Fo)
Sekolah Menengah Atas	9	(6 Vsat, 3 Fo)
Kelurahan	3	(2 Vsat, 1 Fo)
Desa	1	(1 Vsat)
Puskesmas	11	(10 Vsat, 1 Fo)
Total	41	(32 Vsat, 9 Fo)

Kehadiran akses internet di sekolah, desa/kelurahan dan puskesmas sangat dinantikan mengingat besarnya kebutuhan akan keberadaan akses internet tersebut dalam menunjang aktivitas kegiatan di sekolah, desa/kelurahan maupun puskesmas. Di sekolah, akses internet selain dipergunakan para siswa untuk mengenal dan belajar tentang internet juga penting bagi guru dalam melakukan kegiatan administrasi sekolah berkenaan dengan siswa-siswa dan guru itu sendiri.

Untuk desa/kelurahan, akses internet di pergunakan untuk menunjang administrasi desa. Sedangkan di Puskesmas, keberadaan internet sebagai penunjang administrasi kesehatan, dan komunikasi antara petugas kesehatan dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat.

Untuk pengelolaan informasi dan komunikasi berbagai kegiatan rutinitas mulai dari penyediaan dan pengelolaan media informasi publik pemerintah daerah. Selain pengelolaan website pemkab Natuna maupun website Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dijelaskan pada BAB IV dalam Laporan Tahunan ini, penyebaran informasi untuk publik juga dilakukan melalui berbagai media sosial yang ada antara lain Whatsapps, Facebook, Twitter, Instagram maupun youtube. Baik

berupa berita/artikel/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah maupun melalui info grafis untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui medsos. Jumlah pengunjung yang mengakses website Dinas Komunikasi dan Informatika meningkat 569,93% dari tahun 2017 sebanyak 1.044 pengunjung sedangkan di tahun 2018 sebanyak 6.994 pengunjung. Sementara jumlah pengunjung yang mengakses website Pemkab. Natuna menurun 18,31% dari tahun 2017 sebanyak 26.248 pengunjung sedangkan di tahun 2018 sebanyak 21.444 pengunjung.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya pengelola web di masing-masing OPD, khususnya OPD yang telah memiliki website namun belum terkelola dengan baik, Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan PT. Super Sistem Ultima (SSU) dengan mengadakan pelatihan web development yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2018. Kegiatan tersebut merupakan perwujudan MOU antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan PT. Super Sistem Ultima (SSU) dalam mewujudkan Natuna Smart Island.



TABEL 5.9.

JUMLAH KUNJUNGAN WEBSITE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018



Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tabel 5.10.

**JUMLAH KUNJUNGAN WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018**



Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari unsur SDM, kurangnya pegawai terutama Pegawai Negeri Sipil, sehingga di masing-masing bidang belum terpenuhi kebutuhan akan pegawai terutama yang memahami teknologi informasi dan komunikasi/TIK, sehingga dampaknya dalam pelaksanaan tugas rutinitas agak terkendala. Terdapat keterbatasan dana untuk menugaskan pegawai dalam mengikuti Diklat teknis fungsional karena banyak pegawai belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti Diklat teknis fungsional untuk meningkatkan kinerja, kemampuan dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan serta perilaku yang mendukung tugas.
2. Tanggung jawab pimpinan terhadap pekerjaan yang cukup banyak serta menumbuhkan tanggung jawab pegawai sudah relatif baik, hal ini ditunjukkan pegawai dengan semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan atasan dan tugas-tugas rutin secara tepat waktu. Untuk menumbuhkan tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaannya hal yang dilakukan pimpinan adalah dengan menciptakan hubungan kerjasama, memberikan contoh, nasehat dan pengarahan kepada pegawai. Pimpinan yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan kantor dan aktivitas para pegawai membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja para pegawai.
3. Perencanaan yang kurang baik, adanya reviu dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara RI untuk renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dari penginputan renstra, DPA, sasaran program/kegiatan, renaksi, target per triwulan, realisasi per triwulan, renaksi sehingga banyak pekerjaan perencanaan yang menumpuk di akhir tahun.

4. Dari pelaksanaan kegiatan pembangunan kendala yang ada adalah ketidakjelasan dana yang tersedia sementara anggaran ada di DPA/DPPA sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja. Namun capaian indikator kinerja masing-masing kegiatan telah tercapai dengan baik sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV Laporan Tahunan ini. Penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp 3.280.614.634,- (70,96%) dari total belanja langsung Rp 4.623.237.100,-.

REKOMENDASI

1. Pemenuhan kebutuhan akan Pegawai Negeri Sipil terutama yang berlatar pendidikan teknologi informasi dan komunikasi diajukan melalui BKPP, sementara pada tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika mengalokasikan anggaran untuk penyediaan tenaga outsourcing dalam pemenuhan kebutuhan tenaga TIK. Memprioritaskan para pegawai yang belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti Diklat teknis fungsional, direncanakan secara terpadu agar setiap pegawai yang memiliki kemahiran dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya bagi para PTT harus dibekali pengetahuan dan keterampilan teknis dengan sistem diklat khusus bagi PTT untuk meningkatkan kinerja para PTT.
2. Mengusulkan kembali kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun 2018 seperti pelaksanaan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat bagi KIM yang telah terbentuk, melelangkan pekerjaan Pembangunan Jaringan Infrastruktur e-Government Tahap I yang telah gagal lelang sementara belanja konsultasi IT telah selesai dan tercatat sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan pada pencatatan aset. Peningkatan niat dan komitmen pimpinan masing-masing unit eselon III dan IV dalam meningkatkan efektivitas penganggaran dalam rangka meningkatkan proses pelaksanaan program yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran;
3. Meningkatkan koordinasi dan koneksi ke pusat untuk mencari sumber dana baru yang bisa dijadikan alternatif pelaksanaan kegiatan dan pengajuan usulan-usulan kegiatan yang bersumber dari APBN ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi.

4. Untuk peningkatan akses internet OPD perlu dibangun jaringan fiber optic dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitasi teknologi informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik serta rencana penerapan aplikasi yang terintegrasi antar OPD sekaligus efisiensi anggaran belanja internet yang sebelumnya dianggarkan pada masing-masing OPD
5. Meningkatkan kualitas berita/informasi yang ditampilkan dalam website dengan selalu update berita/informasi terbaru kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Natuna, mengingat pada saat ini kebutuhan akan informasi dan media pengakses informasi semakin banyak dan mudah diperoleh.
6. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/satuan kerja/ organisasi/komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Natuna.

LAMPIRAN

BAB VIII

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017 & 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2017				2018				Permasalahan	Permasalahan/ Tidak Luntur	Ket					
			Target Kinerja		Realisasi		Target Kinerja		Realisasi									
			Output/ Outcome	Anggaran (Rp)														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.682.163.000	12 Bulan	1.632.495.150	100%	97,05%	12 Bulan	2.352.250.600	12 Bulan	1.985.558.011	100%	84,41%				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10.209.000	12 Bulan	10.200.000	100%	99,91%	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	11.900.000	100%	99,17%				
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	3.728.000	12 Bulan	1.900.000	100%	50,97%	12 Bulan	770.000.000	12 Bulan	122.472.571	100%	72,04%				
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan pembersihan dan peralatan	12 Bulan	50.800.000	12 Bulan	46.583.000	100%	91,30%	12 Bulan	53.600.000	12 Bulan	53.576.000	100%	99,86%				
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	44.741.000	12 Bulan	44.741.000	100%	100,00%	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	48.914.400	100%	99,83%				
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	39.516.400	100%	98,79%	12 Bulan	51.000.000	12 Bulan	50.750.000	100%	99,51%				
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	285.700.000	18 Jenis	261.834.000	180%	92,29%	10 Jenis	477.500.000	15 Jenis	412.364.000	150%	86,36%				
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	9.950.000	100%	99,50%	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	100%	100,00%				
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	12 Bulan	59.000.000	12 Bulan	53.570.000	100%	90,80%	12 Bulan	74.000.000	12 Bulan	67.251.000	100%	90,88%				
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	582.450.000	12 Bulan	582.103.250	100%	99,94%	32 OK	635.400.000	52 OK	498.735.000	100%	78,59%				
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/kelemba perkantoran	Jumlah pegawai tidak tetap	12 Bulan	454.400.000	12 Bulan	439.300.000	100%	96,68%	22 orang	518.079.600	21 orang	465.756.440	95,45%	89,90%				
11	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	143.115.000	12 Bulan	142.777.500	100%	99,78%	50 OK	295.771.000	142 OK	237.837.400	28,6%	80,41%				
11	Program Penyiapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	30%	70.800.000	30,25%	51.176.300	100,84%	72,28%	45%	120.000.000	61,85%	47.152.300	95,16%	39,29%				
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	62.800.000	Unit	45.478.300	100%	72,41%	2 unit	100.000.000	2 unit	35.839.300	100%	35,84%	Kecelakaan dan kendaraan rusak			
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	5.700.000	100%	71,25%	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	11.313.000	100%	56,57%	Kecelakaan dan kendaraan rusak			
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	30%	45.000.000	24%	41.477.400	80%	92,17%	40%	180.000.000	58,34%	77.719.900	97,24%	43,18%				
1	Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	Pegawai yang mengikuti kursus keterampilan	3 orang	45.000.000	3 orang	41.477.400	100%	92,17%	8 orang	180.000.000	5 orang	77.719.900	100%	43,18%	Target kegiatan tidak terpenuhi karena tidak diadakan secara terjadwal			

No.	Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2017						2018						Permasalahan	Permasalahan/ Tindak Lanjut	Ket
			Target Kinerja		Realisasi		Capaian		Target Kinerja		Realisasi		Capaian				
			Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)			
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas Laporan Kinerja CPD	B/48	21.390.000	-	19.985.400	-	93,61%	68	86.790.000	70,10	43.035.500	103,09%	72,43%			
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-government Persentase instansi pemerintah yang dapat mengakses internet Persentase OPD yang mempublikasikan berita/informasi	11aporan 39,53% 22,69%	21.350.000 759.044.000	11aporan 39,53% 24,37%	19.985.400 700.391.400	100% 100% 100%	93,61% 92,27%	21aporan 41,84% 28,57%	86.790.000 1.280.830.000	41aporan 44,17% 31,09%	63.035.500 775.622.723	100% 105,52%	72,43% 60,56%			
1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi	Jumlah akses internet pemerintahan dan publik	1TRIK	359.524.000	1TRIK	347.353.500	100%	96,61%	1TRIK	254.922.000	1TRIK	134.810.998	100%	52,88%			
2	Penyebutan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah website perangkat daerah Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	2 website 172 artikel	278.832.000	2 website 172 artikel	250.443.400	100%	92,69%	2 website 401 artikel	301.733.000	391 artikel	107.438.003	100%	35,51%			
3	Kegiatan implementasi e-Government	Jumlah layanan e-government	1aplikasi	120.490.000	1aplikasi	94.594.500	100%	78,38%	5 layanan	339.175.000	34 layanan	208.686.500	1133,34%	61,53%			
4	Pembangunan Infrastruktur e-Government	Jumlah OPD yang terintegrasi jaringan e-Government							0 OPD	385.000.000	0 OPD	324.687.295	100%	84,33%			
VI	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Informasi	2,43%	149.653.000	3,34%	135.299.100	149,81%	90,41%	6,58%	203.244.500	22,37%	37.421.700	339,97%	18,41%			
I	Operasional/kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok Informasi masyarakat (KM)	2 kelompok	149.653.000	3 kelompok	135.299.100	150%	90,41%	3 kelompok	203.244.500	14 kelompok	37.421.700	466,67%	18,41%			
VII	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase aspirasi/opini publik yang ditindaklanjuti							100%	150.000.000	100%	72.930.200	100,00%	48,42%			
1	Pengeolaan aspirasi dan opini publik	Jumlah opini publik yang di kelola							30 Opini publik	150.000.000	42 Opini publik	72.930.200	140%	48,42%			

No.	Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2017						2018						Permasalahan	Permasalahan/ Tindak Lanjut	Ket.
			Target Kinerja		Realisasi		Capaian		Target Kinerja		Realisasi		Capaian				
			Output/ Outcome	Anggaran (Rp)													
VIII	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100%	145.170.000	100%	110.577.500	100%	76,17%	100%	250.000.000	100%	221.174.300	103,77%	88,47%			
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral	1 dokumen	145.170.000	1 dokumen	110.577.500	100%	76,17%	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	221.174.300	100%	88,47%			
JUMLAH				2.873.162.000		2.691.402.550		93,67%		4.623.237.100		3.280.614.524		70,96%			



**PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Keterangan
				Output/Outcome	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.157.807.200	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	2.157.807.200	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10.000.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	420.500.000	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	420.500.000	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	53.600.000	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 Bulan	53.600.000	
4	Penyediaan alat tulis kantor	42.136.600	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	42.136.600	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.000.000	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 Bulan	42.000.000	
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	319.430.000	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	319.430.000	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 Bulan	15.000.000	
8	Penyediaan makanan dan minuman	68.000.000	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	12 Bulan	68.000.000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	494.200.000	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30 OK	494.200.000	
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	549.825.600	Jumlah pegawai tidak tetap	22 Orang	549.825.600	
11	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	143.115.000	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	30 OK	143.115.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115.000.000	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	115.000.000	
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	95.000.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 Unit	95.000.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	20.000.000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45.000.000	
1	Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	45.000.000	Pegawai yang mengikuti kursus keterampilan	3 Orang	45.000.000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	63.240.000	Predikat/Nilai Akuntabilitas	BB/7/4	63.240.000	

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Keterangan
				Output/Outcome	Anggaran (Rp)	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	63.240.000	Laporan kinerja OPD	2 Laporan	63.240.000	
V	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	133.200.000	Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-government	44,19 %	133.200.000	
1	Kegiatan Implementasi e-Government	132.600.000	Jumlah layanan e-government	5 Layanan	132.600.000	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.603.957.000	Persentase instansi pemerintah yang dapat mengakses internet	37,82 %	2.603.957.000	
2	Pembangunan Infrastruktur e-Government	2.603.957.000	Jumlah OPD yang terintegrasi jaringan e-Government	13 OPD	2.603.957.000	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	133.200.000	Persentase OPD yang mempublikasikan berita/informasi	60,47 %	133.200.000	
3	Penyebutan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	133.200.000	Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	560 Artikel	133.200.000	
VI	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	247.390.900	Persentase desa/kelurahan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat	11,84 %	247.390.900	
1	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	247.390.900	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM)	4 Kelompok	247.390.900	
VII	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	101.700.000	Persentase aspirasi/opini publik yang ditindaklanjuti	100 %	101.700.000	
1	Pengelolaan aspirasi dan opini publik	101.700.000	Jumlah opini publik yang di kelola	20 Aspirasi/Opini publik	101.700.000	
VIII	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	86.120.000	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100 %	86.120.000	
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	86.120.000	Jumlah dokumen statistik sektoral	1 dokumen	86.120.000	
JUMLAH		5.686.615.100			5.686.615.100	



**REKOMENDASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019/2020
DARI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018	REKOMENDASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019/2020	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembangunan Infrastruktur e-Government	Review Blue Print e-Government Kabupaten Natuna (Belanja Jasa Konsultasi IT)	Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan e-Government Pemkab. Natuna Tahap I	Gagal lelang di tahun 2018
2	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Operasional Kelompok Masyarakat	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut dan Bunguran Batu	Pembinaan KIM yang belum dilaksanakan tahun 2018 akan dilaksanakan pada tahun 2019 mengandung perwakilan KIM yang telah terbentuk	Pembinaan tidak dilakukan pada tahun 2018 dikarenakan ketidakjelasan dana yang tersedia walaupun anggaran dalam DPAda.



**KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
GEDUNG B, PULAU SENUA, LANTAI 2, JL. BATU SISIR, BUKIT ARAI
NATUNA**